

**GERAKAN PEREMPUAN DALAM MELAWAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI SURABAYA**

**(Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:**

**REZA HARUM NOVIA**

**NIM. I7326081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU SOSIAL**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**FEBRUARI 2021**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Harum Novia

NIM : I 732608

Program studi : Sosiologi

Judul skripsi : Gerakan Perempuan dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 07 Februari 2021

Yang Menyatakan



Reza Harum Novia

NIM: I7326081

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, pemeriksaan, dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Reza Harum Novia

NIM : 173216081

Program studi : Sosiologi

Yang berjudul "**Gerakan Perempuan dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial bidang Sosiologi.

Surabaya, 07 Februari 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos, M. Si

NIP.197607182008012022

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Reza Harum Novia dengan judul “Gerakan Perempuan Baru dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)” telah dipertimbangkan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Februari 2021.

### TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. Iva Yullanti Umdatul Izza S. Sos, M. Si

NIP. 197607182008012022

Penguji II

Amal Taufiq, S.Pd, M.Si

NIP. 197008021997021001

Penguji III

Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197706232007101006

Penguji IV

Husnul Muttaqin, S.Ag, S.Sos, M.Si

NIP. 197801202006041003

Surabaya, 11 Februari 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.

NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Harum Novia  
NIM : 173216081  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Sosiologi  
E-mail address : [rezaharumnovia@gmail.com](mailto:rezaharumnovia@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Gerakan Perempuan dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori  
Gerakan Sosial Baru)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2020  
Penulis

Reza Harum Novia

## ABSTRAK

**Reza Harum, 2021, *Gerakan Perempuan dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.**

**Kata Kunci:** Gerakan Perempuan, Kekerasan Seksual, Gerakan Sosial Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk-bentuk gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya. (2) peranan gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru dimana Alain Tourraine mengungkapkan bahwa gerakan sosial merupakan aksi melawan sistem sosial. Aksi yang dilakukan gerakan sosial dapat dilihat sebagai tindakan untuk menuju perubahan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini berarti peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan. Hasil dari wawancara tersebut lalu dideskripsikan dan dianalisa menggunakan teori yang telah dipilih.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya memiliki berbagai tipe atau corak gerakan. Terdapat dua tipe gerakan perempuan yang ditemukan dalam penelitian ini, tipe A merupakan gerakan yang berfokus pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual dan tipe B merupakan gerakan perempuan yang berfokus pada pengembangan diri perempuan. Dalam penelitian ini juga dideskripsikan hambatan yang dihadapi gerakan perempuan dalam penghapusan kekerasan seksual antara lain, kurangnya pemahaman gender yang dimiliki oleh pihak berwajib dan minimnya pengetahuan dasar masyarakat terkait kekerasan seksual.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definsi Konseptual.....	7
F. Sistematika Pembahasan	13
<b>BAB II TEORI GERAKAN SOSIAL BARU .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka.....	23
C. Gerakan Sosial Baru	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	42
D. Tahap - Tahap Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	52
<b>BAB IV GERAKAN PEREMPUAN DALAM MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DI SURABAYA .....</b>	<b>53</b>

A. Gerakan Perempuan di Surabaya.....	53
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Melawan Kekerasan Seksual.....	73
C. Analisis Teori.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>
Jadwal Penelitian.....	101
Pedoman Wawancara.....	101
Dokumentasi Penelitian.....	102
Biodata Peneliti.....	103



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kebun Pemulihan di Surabaya.....	74
Gambar 4.2 Kegiatan Diskusi Oleh Savy Amira.....	76
Gambar 4.3 Kegiatan Mendukung Pengesahan RUU PKS.....	77
Gambar 4.4 Webinar KOPRI FISIP.....	82
Gambar 4.5 Kampanye Oleh UNITE.....	86
Gambar 4.6 Kegiatan Kajian Rutin.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ciri-Ciri Gerakan Sosial.....	32
Tabel 3.1 Jadwal Wawancara Informan.....	42
Tabel 3.2 Subyek Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Gerakan Perempuan dan Fokus Gerakan.....	55



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan yang dihadapi perempuan selama ini terpinggirkan, dianggap tabu untuk dibicarakan. Ruang publik dimana seharusnya perempuan bebas mengutarakan gagasan dan pikirannya malah menjadi *gatekeeper* agar perempuan tidak melewati batasan norma yang ada. Budaya patriarki yang melekat erat dalam sistem sosial masyarakat menempatkan perempuan di posisi yang ter subordinasi dan termarginalkan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan di dalam masyarakat. Belum lagi dampak pandemi COVID-19 yang menerpa seluruh dunia menjadikan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya kian memburuk. Dalam situasi krisis seperti pandemik ini, diskriminasi, kekerasan, kesenjangan, dan eksploitasi selalu hadir.

Sebagaimana data yang dikeluarkan UNFPA bahwa di tahun 2020 ini, sekitar 48 juta perempuan dan anak perempuan, juga 4 juta perempuan hamil dalam kondisi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan.<sup>1</sup> Hal ini juga dialami di negara kita sendiri khususnya kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

---

<sup>1</sup> United Nations Population Fund HQ. (2020, March). COVID-19: A Gender Lens PROTECTING SEXUAL AND REPRODUCTIVE

Kependudukan (DP3K) Jawa Timur selama tahun 2020 ada sejumlah 1.887 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Jawa Timur. Sebanyak 742 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Faktor pemicu terjadinya adalah masalah ekonomi, banyak suami atau istri yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat di-PHK<sup>2</sup>. Ketidaksiapan finansial dan mental dalam menghadapi himpitan ekonomi menyebabkan pelaku melampiaskan rasa frustasinya kepada korban.

Berangkat dari data peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan sebelumnya. Peneliti menemukan sebuah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang siswi SMK di Surabaya, yang menjadi korban dari Kepala Sekolahnya sendiri. Seperti yang terdapat dalam sebuah berita online, dijelaskan bahwa korban merupakan siswi tingkat akhir yang menjalani masa magang diminta untuk datang ke ruangan Kepala Sekolah. Namun disitu dia dikunci dan disekap hingga terjadilah tindak kekerasan seksual<sup>3</sup>. Kasus tersebut sangat membuat geram lantaran sekolah yang seharusnya menjadi tempat teraman kedua setelah rumah malah menjadi tempat mengerikan. Sebagaimana yang dialami AR, ia bahkan ketakutan saat akan berangkat sekolah dan memutuskan untuk tidak bersekolah selama satu tahun usai tragedi tersebut.

---

<sup>2</sup> <https://jatim.inews.id/berita/kekerasan-seksual-masih-tinggi-di-jatim-mayoritas-terjadi-di-rumah>

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210304124615-12-613648/oknum-kepsek-di-surabaya-dipolisikan-dugaan-pencabulan>

Kekerasan seksual terdapat berbagai bentuknya, salah satu kasus kekerasan yang juga perlu mendapat perhatian yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar atau *dating violence*. Bentuk kekerasan seksual dalam berpacaran meliputi menyentuh bagian tubuh tertentu yang tidak dikehendaki pasangan hingga pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku ini mendapat pemakluman dari korban karena dilakukan oleh orang terdekat sekaligus orang yang mereka cintai. Seringkali korban tidak bisa meninggalkan hubungan tersebut akibat ancaman yang diterima entah itu berupa penyebaran konten intim tanpa konsensual (*revenge porn*) atau tindakan penganiayaan.

Hal ini pernah dialami oleh salah satu teman peneliti, awalnya dia tidak berani bercerita tentang apa yang terjadi. Ia hanya menanyakan apa yang harus dilakukan jika berada dalam sebuah hubungan yang beracun. Setelah memberikan saran dan beberapa hari kemudian bertukar pesan singkat, akhirnya dia menceritakan tindakan pacarnya yang beberapa kali memaksa melakukan hubungan seksual. Karena teman peneliti tidak mau dan memilih untuk mengakhiri hubungan, si pelaku malah mengancam akan menyakiti dirinya jika mereka putus. Siklus tersebut berulang terus hingga membuat korban lelah secara psikis dan mental.

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun Savy Amira di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kasus yang ditangani didominasi oleh perkosaan sebanyak 12 orang, disusul dengan *revenge porn* sebanyak 5 orang. Menyambung data sebelumnya ada kasus pelecehan

seksual sebanyak 4 orang, perbudakan seksual 3 orang, pencabulan 3 orang, perkosaan dalam perkawinan 2 orang, eksploitasi seksual 1 orang, dan dicemarkan nama baik 1 orang. Masih berdasarkan Catahu tersebut, relasi yang dimiliki korban dengan pelaku sifatnya beragam. Kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat seperti pacar, suami, dan orang tua.

Peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan terdata oleh WCC atau *Women's Crisis Centre* juga lembaga pemerintah setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, bahwa memang terjadi lonjakan kasus karena faktor eksternal seperti dampak pandemi. Atau pun kedua, mulai timbulnya keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Sebagaimana yang telah menjadi rahasia umum bahwa korban kekerasan seksual seringkali mendapat stereotip perempuan nakal. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual yang terlontar oleh orang-orang yang tidak memiliki simpati adalah apa pakaian korban, jam berapa terjadinya, apa yang dilakukannya saat itu. Seolah mencari celah kesalahan korban dan mengafirmasi tindakan keji pelaku, hal yang terus diulang inilah yang disebut *rape culture*.

Ross memandang budaya termasuk bagian dari suatu sistem pemaknaan, sebagai elemen penting untuk diperhatikan karena hal itu yang menjadi kerangka pembentuk kehidupan sehari-hari seseorang.<sup>4</sup> Budaya mengonstruksikan bagaimana masyarakat dalam menempatkan diri mereka

---

<sup>4</sup> Ross, *Culture in Comparative Political Analysis* in M. I Lichbach & A Zuckerman *Rationality, Culture and Structure* (New York: Cambridge University Press, 2009), 134

dan orang lain, menalar tindakan dan menginterpretasikan motif orang lain, juga membentuk pola seorang individu maupun individu-individu sebagai kelompok ketika melakukan suatu tindakan, termasuk menjauhkan dirinya dari kelompok-kelompok lain. Gerakan perempuan baru atau gerakan feminis generasi keempat adalah istilah yang mendefinisikan gerakan sosial baru di era digital dengan bergerak di tataran wacana atau diskursif melalui pembentukan opini dari pihak yang melawan arus utama agar terciptanya transformasi nilai. Gerakan perempuan di tataran wacana dapat dipandang sebagai sebuah gerakan literasi gender, sehingga dapat juga dianggap gerakan edukasi untuk terwujudnya keadilan gender di berbagai bidang.

Di kota Surabaya sendiri ada beberapa gerakan perempuan yang turut andil dalam melawan budaya patriarkis, *rape culture* dan kekerasan seksual terhadap perempuan, salah satunya dengan diadakannya Women's March. Di aksi tersebut perempuan menuntut aksi pemberhentian kekerasan seksual, juga mendesak pengesahan RUU-PKS agar tidak ada lagi korban kekerasan seksual. Aksi tersebut diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari individu yang memperhatikan isu perempuan, LSM, organisasi perempuan, dan lainnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini dengan judul **“Gerakan Perempuan Dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya (Tinjauan Teori Gerakan Sosial Baru)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka dapat dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seperti apakah bentuk gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya?
2. Bagaimana keterlibatan gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah, penelitian ini diharapkan mampu memenuhi tujuan dan sasaran penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya.
2. Untuk mengetahui keterlibatan gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang keilmuan Sosiologi Gender yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang diteliti, khususnya dalam hal gerakan sosial baru dan *gender equality*. Sehingga memberikan sumbangsih pemikiran bagi program studi sosiologi gender.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan fenomena atau topik yang sama.

## 2. Praktis

- a. Diharapkan dapat membagikan pengetahuan untuk arah perjuangan pergerakan perempuan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- b. Dimungkinkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk menumbuhkan, memajukan dan mengejewantahkan gerakan perempuan yang ada di Surabaya. Sehingga tidak hanya menjadi diskursus semata namun mampu menjadi langkah emansipatoris.

## E. Definsi Konseptual

### 1. Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan pada generasi pertama memfokuskan perhatian kepada isu politik, terlebih dengan maraknya kesadaran berdemokrasi di berbagai negara. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik dengan menjadi anggota masyarakat yang setara dengan laki-laki membuka ruang dalam pembuatan keputusan negara, merupakan inti dalam perjuangan pergerakan perempuan generasi awal. Saat ini, perempuan bahkan telah menjadi pemimpin di tiap lini, entah menjadi walikota, gubernur atau presiden. Perempuan juga memiliki kuota pencalonan di parlemen sehingga memiliki peran untuk membuat kebijakan yang lebih berperspektif gender. Namun demikian, kondisi sosiologis masyarakat menunjukkan bahwa dalam urusan legal-formal



perempuan dan laki-laki diposisikan setara, sedangkan dalam konteks relasi sosial-budaya tidak seperti itu.

Terdapat tiga hambatan utama perempuan untuk dapat menempati kedudukan dan status yang sama dengan laki-laki, hal tersebut bersifat institusional, struktural, dan kultural.<sup>5</sup> Gerakan perempuan generasi awal lebih berfokus pada aspek institusional dan struktural, sedangkan aspek yang kurang dipertimbangkan adalah kultural. Nyatanya aspek kultural inilah yang menjadi hambatan terbesar dalam perwujudan keadilan gender. Oleh karena itu, gerakan perempuan harus mulai menggunakan pendekatan budaya melalui gerakan perempuan baru atau gerakan feminis generasi keempat. Gerakan ini merujuk gerakan di era digital dengan bergerak di ruang diskursif melalui pembentukan opini dari pihak yang melawan arus utama agar terciptanya transformasi nilai. Gerakan perempuan seperti ini dapat dipandang sebagai sebuah gerakan literasi gender. Hal ini sesuai dengan karakteristik gerakan sosial baru. Pergeseran gerakan sosial baru lebih menekankan pada upaya menentang posisi identitas spesifik secara kultural dan simbolis, yang menandakan gerakan kolektif menjadi sebuah bentuk demokrasi kultural.

Gerakan perempuan baru terbentuk dari nilai-nilai feminisme yang berupaya menghadirkan perspektif perempuan dalam ruang publik.

---

<sup>5</sup> Pippa Norris, *Political Recruitment: Gender, Race and Class in The British Parliament* (Cambridge University Press, 1995), 242

Sebagai contoh pada media Magdalene.co, Swara Rahima, Mubaadalah, Konde.co yang menjadi media perwujudan riil *subaltern counter-public sphere*. Pengertian dari *subaltern counter-public sphere* adalah ruang wacana berkumpulnya kelompok subordinat dalam membangun perspektif yang menantang wacana arus utama.<sup>6</sup> Fokus gerakan perempuan baru yang terwujud dalam berbagai media tersebut sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi dalam pembentukan perspektif gender di area masyarakat sipil. Peneliti menjadikan contoh artikel terbitan Magdalene.co dengan judul “Didik Anak Anda Untuk Tidak Memerkosa, Bukan Cara Berpakaian” tulisan milik Nadia Hana Abraham. Dalam artikel tersebut terdeskripsikan dengan jelas pandangan pengarus utamaan gender yang melawan kecenderungan *victim blaming* dalam kasus pemerkosaan. Transformasi sosial untuk mencapai masyarakat yang berperspektif gender membutuhkan lebih banyak gerakan akar rumput dalam menantang dan mendobrak paradigma lama, nilai, dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Obyek perjuangan gerakan sosial baru tidak berporos pada urusan negara, namun kepada upaya untuk mengopresi musuh kelas dari gerakan yang terletak pada konflik yang terjadi dalam arena pembentukan sistem nilai dimana masyarakat mengonstruksinya. Di kota Surabaya terdapat gerakan perempuan baru yang cukup dikenal diantaranya Women’s

---

<sup>6</sup> Fraser, *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy* (Cambridge, MA: MIT Press, 1992), 23

March dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam praktiknya gerakan ini biasanya melakukan kampanye dengan berorasi menuntut isu-isu yang relevan terhadap permasalahan perempuan. Tema yang dibahas akan berbeda pada tiap tahunnya. Pada Women's March Surabaya tahun 2018 secara spesifik menolak RUU Perzinahan, lalu tahun 2019 mendesak untuk disahkannya RUU-PKS. Pada tahun 2020 isu pengesahan RUU-PKS masih tetap diperjuangkan ditambah lagi dengan penolakan RUU Ketahanan Keluarga dan Omnibus Law. Tujuan diadakannya gerakan tersebut tidak hanya menuntut tetapi juga memberikan edukasi berupa wawasan seputar kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, peran dan kontribusi yang mampu dilakukan oleh orang awam jika melihat atau mengalami kekerasan seksual, serta hal-hal terkait isu perempuan yang selama ini kurang familiar di beberapa anggota masyarakat. Gerakan perempuan yang membuka ruang diskusi publik turut menyebarkan gagasan-gagasan terciptanya masyarakat berkeadilan gender.

## 2. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu

memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>7</sup> Secara sederhana kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan seksualitas dengan maksud serta tujuan yang mampu menyebabkan kerugian secara fisik dan psikis pada korban.

Berikut ini kelima belas bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan antara lain:

- a. Perkosaan
- b. Pelecehan seksual
- c. Eksploitasi seksual
- d. Penyiksaan seksual
- e. Perbudakan seksual
- f. Intimidasi/ serangan bernuansa seksual
- g. Prostitusi paksa
- h. Pemaksaan kehamilan
- i. Pemaksaan aborsi
- j. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- k. Pemaksaan perkawinan
- l. Perdagangan perempuan dengan tujuan seksual
- m. Kontrol seksual

---

<sup>7</sup> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

- n. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- o. Praktik tradisi bernuansa seksual

Merujuk data yang dimiliki Komnas Perempuan, kekerasan seksual terjadi pada ranah personal, publik dan negara. Sebanyak 70,11% kasus kekerasan seksual terjadi pada ruang personal. Kekerasan di ruang personal yaitu kekerasan seksual oleh orang dengan hubungan darah, atau kekerabatan, atau perkawinan maupun relasi intim dengan korban. Pelaku dalam kekerasan ranah personal antara lain ayah, kakek, paman, adik, kakak, suami, pacar, dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual pada ranah publik dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterkaitan secara kekerabatan, hubungan darah atau perkawinan. Terjadi dalam lingkup publik yang mana pelaku bisa siapa saja seperti atasan, tetangga, teman, rekan kerja, guru, maupun orang yang tidak dikenal. Dapat dikatakan dalam ranah negara apabila ketika terjadinya kasus kekerasan seksual, aparat yang berada di lokasi kejadian tidak melakukan upaya penghentian bahkan membiarkan kekerasan tersebut berlanjut.

Kekerasan seksual rawan menasar pada kelompok yang dinilai rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki kerap mengontrol yang menimbulkan dominasi terhadap perempuan. Relevan dengan yang diungkapkan oleh Rokhmansyah bahwa perempuan yang hidup dalam budaya patriarki yang mengakar kuat di berbagai aspek kehidupan masyarakat melahirkan kebudayaan yang senjang dan tidak

berkeadilan gender.<sup>8</sup> Bentuk ketimpangan gender ini mewujud dalam pembatasan peran yang dimiliki dan dicapai perempuan dalam sektor domestik maupun publik, sehingga perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi juga kekerasan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan tujuan menciptakan urutan penelitian yang sistematis, runtut dan mudah dipahami. Berikut ini Susunan sistematikanya:

**BAB I Pendahuluan :** Bab ini menguraikan tentang latar belakang gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya. Mulai dari penyebab kekerasan seksual yang dialami korban, data korban kekerasan seksual, serta bagaimana peran dari gerakan perempuan yang ada di Surabaya dalam isu kekerasan seksual tersebut.

**BAB II Teori Gerakan Sosial Baru :** Dalam bab ini peneliti membahas tema penelitian dengan beberapa referensi yang ada, digunakan untuk menelaah peran gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya. Lalu, peneliti juga menyajikan teori gerakan sosial baru untuk dikaitkan dengan tema dan sebagai media menganalisis masalah penelitian. Selain itu dicantumkan pula beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti sebagai referensi.

---

<sup>8</sup> Sakina, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia* (Social Work Journal, 2017), 7

**BAB III Metode Penelitian :** Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini menghimpun data dengan proses wawancara kepada beberapa informan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, peneliti menuliskan tentang data yang diperolehnya terkait tema penelitian. Metode penyajian data bisa melalui teks atau dokumen gambar. Sedangkan analisis data bisa menjabarkan macam-macam data melalui analisis deskriptif.

**BAB IV Gerakan Perempuan Dalam Melawan Kekerasan Seksual :** Peneliti mendeskripsikan data hasil penelitian “Gerakan Perempuan Dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya” lalu dianalisis dengan menggunakan teori gerakan sosial baru.

**BAB V Penutup :** Bab ini mengemukakan kesimpulan dari rumusan masalah tentang peran gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual, dan saran berdasarkan hasil temuan penelitian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **TEORI GERAKAN SOSIAL BARU**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna menjadi acuan peneliti ketika melakukan penggalan data terkait dengan fenomena yang diteliti. Penelitian terdahulu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda serta ciri khas ketajaman dalam penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual seperti penelitian yang dipaparkan di bawah ini:

1. PERAN GERAKAN PEREMPUAN WSC (WOMEN STUDIES CENTRE) DALAM KESETARAAN GENDER: STUDI DESKRIPTIF DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Penelitian mengenai gerakan perempuan ini sebelumnya sudah pernah diteliti pada tahun 2019 oleh Alwi Siti Alawiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini sepenuhnya membahas gerakan perempuan WSC yaitu gerakan perempuan yang bertujuan menciptakan sensitivitas gender bagi masyarakat UIN Bandung. Awal mula terbentuknya gerakan ini adalah kesadaran beberapa mahasiswa akan permasalahan yang dihadapi perempuan. Mereka menyadari bahwa perempuan selama ini pada dasarnya tereksplorasi oleh budaya patriarki yang melekat erat di segala bidang kehidupan. Hal tersebut



menimbulkan ketimpangan gender yaitu penempatan posisi perempuan yang terpinggirkan dari suara dominan. Ketika suara perempuan tidak lagi dianggap penting dan tidak dipertimbangkan inilah penindasan hak-hak dasar perempuan.

Peran WSC untuk menciptakan kesetaraan gender di kampus berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual serta perlindungan korban. Dalam hal ini WSC menyediakan bilik pengaduan yang berguna bagi mahasiswa ketika ingin melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami atau diketahuinya. Selanjutnya laporan tersebut akan ditinjau lalu diproses oleh pihak WSC. Bagi mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pernah bersinggungan dengan kasus serupa, WSC juga menyediakan sesi konseling. Gerakan ini juga memiliki kegiatan edukasi sebagai langkah pencegahan dalam terjadinya tindak kekerasan seksual di kampus. Mereka membentuk klub keperempuanan yang rutin melakukan diskusi dan kajian terkait isu feminisme, permasalahan yang menimpa perempuan, dan studi gender. Bahkan mereka juga sempat melakukan seminar akbar. Berkat kegigihan gerakan yang dimulai tahun 2017 tersebut mereka mampu memunculkan kesadaran mengenai keadilan gender, dan permasalahan kekerasan seksual di sekitar lingkungan. Hal ini membuat mereka mendapat perhatian Komnas Perempuan dan diundang mengikuti beberapa forum.

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah fokus pada gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual, serta bagaimana upaya mereka dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual terulang lagi. Sorotan mengenai upaya pembentukan opini berkeadilan gender juga menjadi poin penting lainnya. Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan metode dalam memperoleh data yaitu menggunakan teknik penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini merujuk teori peran milik Robert K. Merton. Penelitian ini memandang gerakan perempuan WSC melalui kacamata teori peran dan bagaimana keterkaitannya dengan nilai-nilai feminisme. Sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis menggunakan teori gerakan sosial baru.

## 2. STRATEGI GERAKAN RELAWAN JAKARTA MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL (KAWANKU) TERHADAP PEREMPUAN

Penelitian ini oleh Indah Lestari Dwi Astuti program studi sosiologi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2017. Pokok bahasan dalam penelitian ini seputar gerakan Relawan Kawan-KU yang merupakan gerakan berfokus pada isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta. Relawan Kawan-KU bergerak karena kondisi kekerasan seksual di Jakarta yang semakin hari semakin memprihatinkan. Permasalahan ini seharusnya menjadi urusan bersama

dan membutuhkan suatu gerakan solidaritas yang terjun langsung untuk menyelesaikannya.

Strategi Relawan Kawan-KU dalam aksi melawan kekerasan seksual menggunakan metode pencegahan melalui pemberian informasi dan edukasi, yang mana bertujuan meningkatkan kewaspadaan warga Jakarta khususnya perempuan untuk berani melawan dan mencegah kekerasan seksual. Bentuk kegiatannya antara lain strategi dialog warga, strategi kotak suara, strategi panggung suara warga, strategi multimedia dan strategi tanggung bersama. Strategi tersebut melibatkan masyarakat secara aktif untuk peduli pada kasus kekerasan seksual. Mereka membuka ruang diskusi dengan warga yang kurang mengetahui tentang isu kekerasan seksual dan menerima tanggapan, curahan dan komentar terkait isu kekerasan seksual.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikerjakan yaitu bagaimana suatu gerakan perempuan dalam mencegah kekerasan seksual, serta langkah apa saja yang digunakan dalam memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan-pun sama yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikerjakan ada pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada strategi gerakan dalam melawan kekerasan seksual, namun juga

pemaknaan yang dipahami dan dimengerti oleh anggota Relawan Kawan-KU terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Sedangkan penelitian yang dikerjakan akan menyinggung gerakan perempuan secara mendalam.

### 3. GERAKAN POLITIK PEREMPUAN ORMAS PEREMPUAN MAHARDHIKA

Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Rizky Elok Kusuma Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian menjabarkan tentang Gerakan Perempuan Mahardhika. Sebuah gerakan yang bertujuan sebagai media pembangunan dan pengembangan politik perempuan demi terciptanya kesetaraan gender di berbagai bidang. Gerakan ini menjunjung tinggi nilai-nilai feminisme di dalamnya, dimana mereka mempercayai persamaan hak perempuan akan terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki atau dengan kata lain melalui perbaikan dalam hal sosio kultural.

Strategi yang digunakan Perempuan Mahardhika dalam pembangunan kesetaraan gender dalam masyarakat melalui pendidikan feminisme, yaitu suatu upaya pengenalan kondisi dan situasi perempuan. Program yang diselenggarakan di Yogyakarta ini berisi materi tentang permasalahan perempuan, seks, gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan perempuan. Selain itu, sejak tahun 2013 Perempuan Mahardhika berkonsentrasi akan isu kekerasan seksual. Mereka menggelar Konferensi Perempuan Jakarta yang

menghasilkan sebuah komunitas Relawan Jakarta Melawan Kekerasan Seksual (Relawan Kawan-KU). Relawan Kawan-KU bertugas sebagai media komunikasi, edukasi dan sosialisasi tentang kekerasan seksual di Jakarta. Selanjutnya ada Konferensi Perempuan Muda se-Jawa yang memiliki misi menuntut adanya RUU-PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Mereka berkampanye menyebarkan brosur di kampus dan mengumpulkan 10.000 tanda tangan petisi yang akan diserahkan kepada DPR RI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah sama-sama berusaha menggali gerakan dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan. Strategi yang digunakan dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat tentang kekerasan seksual meskipun apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak terlalu banyak. Lebih lanjut lagi penelitian ini memiliki pendekatan metodologi yang sama yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah pokok permasalahan penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada perkembangan ormas Perempuan Mahardhika dan wujud gerakannya. Penelitian ini secara mendetail mendeskripsikan perkembangan Perempuan Mahardhika dari tahun ke tahun serta bagaimana strategi yang mereka gunakan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Selain itu aksi atau strategi yang dibahas dalam

penelitian ini kurang berfokus pada aspek edukasi terhadap masyarakat, dalam penelitian ini menunjukkan proses perubahan struktural dan hukum yang memayungi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

#### 4. GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA DAN INDIA

Penelitian yang diteliti pada tahun 2018 oleh Nony Natadia Ernel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penelitian ini menyoroti adanya kemiripan aspek sosiologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia dan India. Lemahnya perlindungan perempuan menjadikan kasus kekerasan seksual terus meningkat di dua negara ini. Penelitian ini mengungkapkan aspek yang mendasari adanya kekerasan seksual antara lain kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, hingga kecemburuan buta.

Pengumuman *Internatinal Decade of Women* pada tahun 1975 oleh PBB memberikan semangat baru dalam upaya gerakan perempuan terhadap isu kekerasan seksual. Pemerintah India menerbitkan KUHP India yang menyatakan kegiatan pelecehan seksual merupakan pelanggaran dengan sanksi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda. Namun dalam proses penegakan hukumnya masih lemah bahkan kurang diperhatikan. Atas dasar itulah muncul berbagai gerakan perempuan seperti Geng Gulabi dan Jagmati Sangwan. Gerakan

perempuan ini menyuarkan upaya keadilan terhadap perempuan dengan melakukan aksi demonstrasi. Sedangkan di Indonesia ada banyak jenis gerakan perempuan antara lain Perempuan Mahardhika, LBH APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan), Rifka Annisa WCC, PPSW (Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita), LSM Savy Amira dan lainnya. Gerakan perempuan di Indonesia cenderung ke arah aksi massa melalui demo menyuarkan kampanye anti kekerasan seksual dan menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu juga ada forum diskusi ilmiah dan sesi berbagi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan informasi terhadap kasus kekerasan seksual.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan terletak pada fokus permasalahan yang terletak dalam upaya gerakan perempuan terhadap kekerasan seksual. Strategi yang digunakan oleh gerakan perempuan di Indonesia dan India dalam menangani permasalahan perempuan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah metode yang digunakan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara mendalam sebagaimana yang digunakan dalam skripsi ini. Selain itu penelitian ini mempunyai tujuan yang berbeda yaitu untuk memberikan perbandingan upaya strategi gerakan perempuan di Indonesia dan India dalam isu kekerasan seksual yang ada di masing-masing negara.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Sejarah Pergerakan Perempuan di Indonesia

Gerakan perempuan telah tumbuh pada awal abad ke-20 di Indonesia dengan didirikannya sekolah oleh pemerintah kolonial Belanda, serta berdirinya organisasi modern milik “kaoem bumiputera” ketika itu. Menurut Susan Blackburn, gerakan perempuan di Indonesia merupakan bentuk perjuangan dalam menyuarkan status, pengalaman diskriminasi serta penindasan yang mereka terima melalui keikutsertaan dalam organisasi perempuan lalu terlibat dalam politik.<sup>9</sup> Kekuatan kolektif merupakan sebuah metode yang efektif dalam gerakan perempuan di Indonesia. Sebagaimana pendapat Blackburn bahwa gerakan perempuan di bawah naungan organisasi akan lebih memiliki kekuatan dan bersifat berkelanjutan daripada upaya individu.

#### a. Periode emansipasi nasional

Dimulai pada tahun 1900-an dengan adanya kebijakan etis yang dikeluarkan pihak kolonial Belanda dengan membuka sekolah bagi perempuan. Pendiri sekolah perempuan merupakan aktivis perempuan dari golongan priyayi serta pegawai birokrasi kolonial yang telah mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda. Pembukaan sekolah perempuan sebenarnya memiliki maksud terselubung dari pihak Belanda, mereka membutuhkan juru tulis di

---

<sup>9</sup> Blackburn, *Women and The State in Modern Indonesia* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), 11



perkebunan atau perkantoran dengan usaha perkebunan. Sebagai contoh pembangunan sekolah perempuan di Bukittinggi yang terletak di daerah perkebunan, lalu di Tomohon merupakan tempat perkebunan cengkeh yang luas. Selain itu di daerah Bandung, Yogyakarta, Salatiga, Surabaya yang merupakan tempat pengepul hasil perkebunan.<sup>10</sup>

Setelah perempuan pribumi ini memahami huruf dan bahasa Belanda mereka menjadi sosok yang kritis akan pemerintahan kolonial. Tidak hanya itu, perlawanan mereka juga menasar pada adat kawin-cerai yang pada praktiknya merendahkan derajat perempuan. Pergaulan mereka melampaui rumah dan desanya, mereka menjalin komunikasi dengan aktivis laki-laki terpelajar untuk melawan penjajah. Para perempuan ini memiliki suatu kesadaran gerakan untuk memerdekakan bangsa.

Pada tahun 1912 didirikan Poetri Mardika yaitu organisasi perempuan pertama yang memiliki keterkaitan dengan Boedi Oetomo. Setelah itu terbit berbagai majalah yang mengemukakan praktik perkawinan anak dan poligami. Kaum perempuan selanjutnya mengorganisasikan diri ke dalam organisasi berbasis agama. Pada tahun 1917 Aisyiyah menjadi organisasi perempuan dalam gerakan

---

<sup>10</sup> <https://indoprogress.com/2017/12/gerakan-perempuan-di-indonesia-pasang-surut-memperjuangkan-hak/>, 2

pembaharuan Islam Muhammadiyah. Disusul dengan organisasi perempuan Katolik dan Protestan.<sup>11</sup>

b. Periode gerakan nasional

Ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia Nasional pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dengan mosi reformasi perkawinan dan pendidikan. Juga mengkonsolidasi perjuangan perempuan untuk memerdekakan Indonesia. Hasil dari kongres pertama yaitu dibentuknya Persatuan Perempuan Indonesia (PPI) sebagai federasi organisasi perempuan yang ada di Indonesia. PPI lalu berubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Mereka mencetak majalah yang berfokus pada isu pendidikan dan membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak.

Pada Kongres Perempuan Nasional yang berikutnya diadakan di Jakarta pada tahun 1935, Bandung di tahun 1938, dan Semarang pada 1941. Gerakan nasional berkembang pesat dan perjuangan nasional berangsur tumbuh, hanya organisasi Serikat Rakyat dan Istri Sedar yang secara terbuka dan sistematis melakukan perlawanan terhadap politik pemerintahan kolonial Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 semua organisasi

---

<sup>11</sup> Saskia Wieringa, *Pasang Surut Gerakan Perempuan Indonesia* (Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan Kalyanamitra, 2010) in *Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara* (Komnas Perempuan), 28

perempuan dilarang beroperasi kecuali *Fujinkai* yang merupakan organisasi perempuan buatan Jepang. Beberapa anggota organisasi perempuan yang bergerak di bawah tanah ditangkap dan dibunuh. Pasca kekalahan Jepang, kecenderungan perjuangan gerakan perempuan ialah mendorong jaminan hukum dan hak politik yang sama bagi perempuan. Sehingga dalam Undang - Undang Dasar 1945, negara menjamin perempuan memperoleh hak hukum dan politik yang setara dengan laki-laki.

c. Periode kudeta militer

Sejak akhir 1950-an organisasi perempuan garis kiri mulai memperoleh pencapaian-pencapaian penting. Salah satu contohnya pada tahun 1961 tercatat anggota Gerwani telah mencapai lebih dari satu juta orang. Mereka mendidik perempuan untuk menjadi guru pada Taman kanak-kanak yang diselenggarakan di pasar, perkebunan, dan kampung. Selain itu diadakan pula badan penyuluh perkawinan yang bertugas membantu perempuan yang mengalami permasalahan dalam perkawinan. Gerwani mengadakan kursus kader yang mengajarkan buku karya Soekarno, Friedrich Engels, August Bebel, dan Clara Zetkin. Dalam kursus kader diajarkan keterampilan untuk hal-hal teknis dasar seperti pembukuan dan ilmu manajemen. Untuk urusan publikasi, Gerwani melahirkan dua majalah. Pertama, ada Api Kartini yang berisi tulisan tentang memasak, pola pengasuhan anak, mode terbaru, urgensi pengadaan

taman kanak-kanak, dan keburukan imperialisme. Kedua, Berita Gerwani yang merupakan majalah internal organisasi.

Ketenaran Gerwani menemui titik penghancuran melalui media massa mulai dari 10 Oktober 1965. Angkatan Bersenjata menyebarkan informasi melalui surat kabar Berita Yudha bahwa pelaku pembunuh tujuh orang jenderal di lubang buaya adalah perempuan muda komunis yang mendapatkan pelatihan khusus. Aktivistis Gerwani juga dituduh menyiksa para jenderal secara keji dengan berbagai cara seperti menyilet alat kelamin dan mencungkil mata. Meskipun kemudian propaganda kekerasan yang menyudutkan Gerwani telah terbukti bohong belaka berdasarkan catatan *visum et repertum* ketujuh jenderal, bahwa mereka meninggal karena ditembak tanpa luka sayatan ataupun mata yang tercungkil. Pencitraan dan berita miring yang menekan Gerwani menyebabkannya dikeluarkan secara resmi dari Kowani (Kongres Wanita Indonesia) pada akhir Oktober 1965. Selanjutnya pada tahun 1966 pemerintah Orde Baru menyatakan Gerwani sebagai organisasi terlarang dan organisasi perempuan lainnya harus bisa menyesuaikan diri.

d. Periode orde baru

Dalam rangka menggeser kepemimpinan Orde Lama, Pemerintahan Orde Baru melancarkan dukungan massa dengan strategi mengadakan pertemuan bersama perempuan yang kontra

terhadap Gerwani, kaum pemuda, dan pelajar. Namun organisasi-organisasi tersebut yang semula menyambut pembaharuan Orde Baru mengalami kekecewaan dengan adanya tekanan politik dari pemerintah. Mereka tetap diperbolehkan menjalani kegiatan seperti biasanya tetapi tidak boleh mengungkapkan bentuk ketidakadilan rezim yang berkuasa atau akan dicap sebagai organisasi subversif dan provokator. Seperti pada tahun 1978 Perwari dipaksa bergabung secara resmi dengan partai pemerintah yang berkuasa yaitu Golkar. Organisasi perempuan yang dianggap menyimpang akan menghadapi permasalahan besar. Dengan kata lain organisasi perempuan yang tidak terikat atau independen telah kehilangan kekuatan dan perlahan surut digantikan organisasi perempuan buatan pemerintah.

Organisasi-organisasi perempuan milik pemerintah mengemban program nasional yaitu keluarga berencana, melalui Dharma Wanita bagi isteri anggota Pegawai Negeri Sipil dan Dharma Pertiwi bagi isteri anggota ABRI. Sedangkan bagi perempuan yang bukan isteri PNS atau ABRI akan dianjurkan mengikuti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu atau penyuluh program KB. Untuk mengontrol gerakan dan ideologi yang berkembang di organisasi perempuan maka dikemas sebuah ideologi peran yaitu Panca Dharma Wanita. Selain itu, segala organisasi perempuan akan diawasi oleh lelaki yaitu pejabat negara

setingkat lokal sampai pusat. Pada periode ini organisasi perempuan dikediri dan dipaksa diam dengan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan revolusioner seperti yang dilakukan oleh Gerwani dan lainnya. Mereka juga tidak boleh menyuarakan kritik politis atas rezim yang berkuasa.

e. Periode melek demokrasi

Dimulai pada awal dekade 1980-an muncul organisasi perempuan yang berjuang mengembalikan hak-hak perempuan yang telah dihancurkan selama berkuasanya orde baru. Organisasi ini kerap disebut LSM Perempuan (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kegiatan yang mereka lakukan antara lain mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan perekonomian, dan menuntut hak dipilih bagi perempuan dalam parlemen. LSM Perempuan ini antara lain seperti Rifka Annisa WCC, Kalyanamitra, dan Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta. Pada awalnya isu yang mereka perhatikan adalah eksploitasi buruh perempuan. Hingga pada tahun 1990-an perjuangan mengambil kembali hak-hak perempuan beranjak ke isu kekerasan yang dialami perempuan. Gerakan ini membongkar kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan seperti kasus DOM di Aceh dan Papua, Tragedi 1965 di seluruh wilayah Indonesia, invasi militer di Timor Leste dan lain sebagainya.

Setelah mundurnya pemerintah Orde Baru, dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia sejak 4 Desember hingga 22

Desember 1998 di Yogyakarta oleh LSM Perempuan. Salah satu isu yang diangkat dalam Kongres adalah memperjuangkan hak dipilih perempuan dalam parlemen. Hal ini karena keterwakilan perempuan di parlemen sejak Indonesia merdeka tidak pernah lebih dari 10 persen. Selanjutnya gerakan perempuan melakukan deklarasi *affirmative action* (tindakan khusus sementara) untuk 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen demi kemajuan perjuangan hak-hak perempuan. Hal ini disetujui oleh pemerintah dan dicantumkan dalam UU Pemilu. Dalam isu hak asasi perempuan, juga mengalami perkembangan dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atas keputusan Presiden BJ. Habibie. Komisi ini merupakan akses dalam membongkar kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara. Pada periodisasi ini, isu yang terkait perempuan disuarakan dengan lantang dengan maksud mengubah kebijakan publik. Atas nama kepentingan perempuan diterbitkan beberapa aturan perundangan dan dikeluarkannya anggaran untuk menunjangnya. Agenda perempuan tidak ditolak bahkan diberi akses oleh penyelenggara negara.

### C. Gerakan Sosial Baru

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru. Perspektif yang lahir pada tahun 1960-an akhir di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika.<sup>12</sup> Saat itu di Eropa maupun Amerika ada banyak gerakan sosial berskala besar dengan mengangkat isu-isu humanis, kultural dan non-materialistik. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, muncul gerakan perjuangan hak-hak sipil warga negara atau *civil society*. Gerakan ini berupa organisasi sipil yang memperjuangkan dan mentransformasi pembaruan struktur pada lembaga-lembaga yang cenderung menindas warga negara secara represif. Setelah itu, mulai bermunculan berbagai gerakan moral perdamaian dengan ideologi anti perang. Aktivistis yang tergabung dalam organisasi anti perang misalnya saat itu menolak dengan tegas ekspansi militer Amerika Serikat di Vietnam. Gelombang perlawanan melahirkan berbagai bentuk aktivisme perdamaian yang lain dan mendukung dekolonialisasi.

Perspektif gerakan sosial baru merupakan kritik atas perspektif lama yang terjebak dalam diskursus ideologi kelas. Tujuan dan nilai gerakan sosial baru bersifat universal, plural, berorientasi pada isu dan tidak berfokus pada gagasan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Meski begitu, gerakan sosial baru mempunyai irisan kemiripan dengan gerakan sosial lama terkait hal strategi dan tujuan yaitu

---

<sup>12</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru (GSB)*, (Yogyakarta: Resist Book 2010), 96



memperjuangkan isu peningkatan buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas.<sup>13</sup> Contoh gerakan sosial baru seperti gerakan feminisme, gerakan anti nuklir, anti rasisme, gerakan sipil, *environmentalism*, dan lain sebagainya.

Tabel 2.1  
Ciri-Ciri Gerakan Sosial

Aspek	Gerakan Sosial Klasik	Gerakan Sosial Neo Klasik	Gerakan Sosial Baru
<b>Partisipan</b>	Kerumunan	Perilaku kolektif yang bersifat formal dan terorganisir	Individu, kelompok, komunitas
<b>Bentuk</b>	Konflik	Konflik ideologi	Isu, kepentingan dan medan konflik yang baru
<b>Tujuan</b>	Revolusi	Kesejahteraan	Kesadaran akan masa depan

(Sumber: Rajendra Singh dalam Gerakan Sosial Baru)

Dalam periode GSB (gerakan sosial baru), Rajendra Singh menjelaskan setidaknya ada dua aliran utama yang muncul antara lain:

1. Teori mobilisasi sumber daya

*Resources mobilization theory* atau teori mobilisasi sumber daya datang dari Amerika dengan dipengaruhi pemikiran Oberschall, Mancur Olson, Charles Tilly McCarthy and Zald, Gamson, dan Tarrow. Paradigma ini berfokus pada skema mobilisasi yang diorganisir secara rasional, dan canggih dalam hal karakteristik ataupun bentuk gerakan yang dilakukan oleh anggota dari gerakan

<sup>13</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru (GSB)*, (Yogyakarta: Resist Book 2010), 121-122

sosial baru. Istilah mobilisasi merujuk pada istilah proses pembentukan kerumunan (*crowd*), kelompok, asosiasi dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bagi teori mobilisasi sumber daya, elemen penting sebuah gerakan terletak pada tindakan yang dilakukan individu melalui organisasi.

Terdapat bermacam-macam tingkat dan tipe keterlibatan individu dalam sebuah gerakan hal ini dibedakan menjadi, penganut yang meliputi konstituensi yaitu sumber dari beberapa sumber daya, anggota tetap dan peserta, serta para pencari keuntungan. Individu yang tergabung dalam gerakan tersebut perlu dimobilisasi untuk menjadi bagian dalam menjalankan aktivitas, strategi dan juga taktik sebuah gerakan sosial. Selain anggota yang terhimpun dalam gerakan sosial ada juga sumber daya lain yang perlu dimobilisasi. Uang, sumbangan dana para elit, dukungan senjata, dukungan media dan pembentukan opini publik yang condong untuk mendukung gerakan tersebut merupakan sumber-sumber daya.<sup>14</sup> Agar sistem mobilisasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan progres yang maksimal maka diperlukan seorang pemimpin dalam organisasi, mereka disebut sebagai kaum profesional. Mereka memiliki peran yang krusial dalam organisasi gerakan, karena saat itu di akhir abad 20-an banyak dijumpai masyarakat berciri organisasi. Ciri masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Mayer Zald dan Roberta Ash, *Social Movements in Organization: Coup d'Etat, Insurgency, and Mass Movements*, (American Journal of Sociology, 1983), 156

berorganisasi adalah tindakan yang menghasilkan perubahan sosial menuntut keahlian teknis tinggi, terlebih dalam mengelola sumber-sumber daya, merencanakan strategi, menghimpun dana, melakukan penekanan kepada kelompok elitis, dan melakukan kontak dengan media massa.<sup>15</sup>

Teori mobilisasi sumber daya lebih memandang aspek ekonomi dan politik daripada *mass society theory* ataupun aspek psikologis dari anggota gerakan tersebut. Perspektif ini membantah asumsi bahwa keterlibatan individu dalam suatu gerakan didasari oleh motivasi pribadi dan alienasi semata. Padahal, ketika dalam suatu masyarakat muncul rasa ketidakpuasan maka hal itu cukup menjadi motif yang memungkinkan untuk sebuah gerakan sosial muncul. Partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial dipandang sebagai hasil dari proses keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan aspek untung rugi atas keikutsertaannya dalam sebuah gerakan sosial. Jadi, secara garis besar teori mobilisasi sumber daya merupakan upaya pencarian basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

## 2. Teori yang berorientasi identitas

Teori identitas berasal dari Eropa dengan karakteristik yang ekspresif, dipengaruhi dengan pemikiran Pizzorno, Jean Cohen dan

---

<sup>15</sup> John McCarthy dan Mayer Zald, *Social Movements in an Organizational Society*, (New Brunswick, NJ: Transaction), 46

yang lebih terbaru oleh Alain Touraine. Teori ini mendeskripsikan asumsi dasar sebagai kritik atas perspektif teori mobilisasi sumber daya.<sup>16</sup> Basis rasionalitas dalam teori mobilisasi sumber daya tidak mampu menjelaskan beberapa bentuk gerakan sosial baru seperti gerakan *civil society*, gerakan feminis, *environmentalist*, dan gerakan damai. Sebagai perbandingan, teori mobilisasi sumber daya terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme, maka teori identitas memusatkan perhatian pada fenomena gerakan yang bersifat non-materialistik dan ekspresif. Teori identitas mengurai anggapan-anggapan terkait integritas dan solidaritas kelompok yang ikut terlibat aksi kolektif. Gerakan sosial tidak senantiasa merupakan ekspresi terkalkulasi terhadap musuh, lebih jauh lagi ia menggerakkan sesuatu yang lain.

Menurut Alain Touraine unsur pokok dari sebuah gerakan sosial baru masyarakat kontemporer adalah aksi melawan sistem sosial. Aksi semacam ini tidak mengharuskan sebuah gerakan menjadi voluntaris dan individualis. Karena aksi relawan (*voluntarisme*) maupun aksi individu tidak memberikan wawasan dalam subjek aksi.<sup>17</sup> Dalam menanggapi gerakan sosial baru terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yaitu tindakan sosial. Sebuah tindakan yang dilakukan individu dalam gerakan sosial merupakan upaya

---

<sup>16</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru (GSB)*, (Yogyakarta: Resist Book 2010), 113

<sup>17</sup> John Lechte, *Fifty Key Contemporary Thinkers*, (London and New York: Routledge, 1994), 299

memproduksi dan mentransformasi struktur dan tatanan sosial yang telah berlaku sebelumnya. Aksi yang dilakukan gerakan sosial ini dapat dilihat sebagai tindakan yang wajar untuk menuju suatu perubahan yang diharapkan oleh masyarakat.

Jika menilik istilah masyarakat akan merujuk ke definisi integrasi sosial, sedangkan gerakan sosial sendiri menyarankan terjadinya konflik yang menentang integrasi sosial atau sistem sosial yang telah ada sebelumnya. Konflik yang terjadi ini tidak selalu sama dengan suatu kondisi kritis masyarakat dan runtuhnya organisasi sosial. Maka dari itu, perubahan sosial yang terjadi dikarenakan gerakan sosial tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bersifat patologis atau disfungsional. Analisis yang diungkapkan oleh Touraine mengenai gerakan sosial baru masyarakat kontemporer haruslah dimengerti melalui kerangka penghubung antara pemahaman diri dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Touraine mengembangkan penyelidikannya ke tiga tingkatan guna memeriksa penghubung antar dua elemen dalam analisisnya sebagai berikut:<sup>18</sup> pertama yaitu sebuah elaborasi representasi sosial, struktural, dan kultural masyarakat kontemporer, kedua ialah sebuah penafsiran konflik dan tegangan yang terlibat dalam proses pencarian identitas manusia dan analisisnya dalam kerangka rujukan orientasi

---

<sup>18</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru (GSB)*, (Yogyakarta: Resist Book 2010), 148

aksi, ketiga Touraine menyadari pentingnya kesadaran individual sebagai ciri spesifik makhluk hidup.

Meski begitu Touraine beranggapan bahwa gerakan sosial seharusnya dilihat sebagai suatu tipe khusus dari sebuah konflik sosial. Ada beberapa aksi kolektif yang tidak tergolong ke dalam konflik seperti kepanikan, tren busana atau *fashion*, inovasi kultural, dan opini terkini. Sebuah konflik menurut Touraine harus dimaknai dengan memiliki sekumpulan aktor yang terorganisir, taruhan nilai yang dipegang teguh, serta konflik dan kompetisi antar pihak yang berseberangan dalam mencapai apa yang dipertaruhkan.<sup>19</sup>

Studi yang mempelajari gerakan sosial berfokus pada orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok atau aliansi, lalu mengorganisasikan dirinya dan menjadi katalis bagi perubahan sosial. Menurut Mario Diani, gerakan sosial adalah proses sosial yang melibatkan relasi konfliktual dengan oposisi yang jelas, baik dalam upaya menghalangi atau menciptakan perubahan sosial.<sup>20</sup>

Dapat menghubungkan individu melalui sebuah jaringan informal seperti keresahan dan perhatian terhadap hak-hak juga kesejahteraan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam upayanya ditunjukkan dengan mengorganisasi massa yang memiliki identitas kolektif

---

<sup>19</sup> Alain Touraine, *An Introduction to The Study of Social Movements*, (Social Research Vol. 52, 1985), 75

<sup>20</sup> Della Porta, D & Mario Diani, *Social Movements: An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition* (Malden, MA: Blackwell, 2006), 20

tertentu untuk menentang otoritas, pemegang kekuasaan atau kepercayaan dan praktik-praktik kultural.

Merujuk pada pandangan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam gerakan sosial tiga variabel penting antara lain: relasi konflikual, jaringan informal dan identitas kolektif. Gerakan perempuan merupakan gerakan sosial yang bercita-cita mewujudkan kepentingan perempuan dan mendorong adanya transformasi sosial ke arah tatanan sosial yang berperspektif gender. Gerakan perempuan mengacu pada gagasan feminisme yang membawa semangat berkeadilan gender dalam semua aspek kehidupan. Feminisme berusaha mengklarifikasi sejarah peradaban yang didominasi laki-laki dan menentang adanya subordinasi perempuan yang diwajarkan oleh moral arus utama seraya mendorong pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistika dan pengukuran untuk menghasilkan penemuan-penemuan.<sup>21</sup> Penelitian dengan tipe ini berfokus pada penjelasan informan terkait fenomena yang dialami subyek penelitian antara lain tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Data yang diperoleh bersifat mendalam dengan menguraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

Aspek yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah strategi yang digunakan peneliti dalam memperoleh data, pandangan yang dimiliki peneliti tentang tema penelitiannya, dan metode seperti apa yang cocok diterapkan untuk menjalankan strateginya.<sup>23</sup> Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan aspek keterpengaruhan antar variable, penelitian kualitatif berusaha memperoleh pemahaman akan suatu fenomena sehingga lahirnya sebuah teori.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin menyajikan data berupa narasi deskriptif yang diperoleh dari beberapa

---

<sup>21</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta; Mitra Wacana Media. 2012), 51

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009) 186

<sup>23</sup> *Ibid*, 3



informan melalui wawancara. Selain itu disertakan pula bukti dokumentasi dan berbagai sumber kepustakaan yang membahas tema penelitian untuk menunjang data terkait penelitian. Metode kualitatif tersebut membantu peneliti untuk lebih mendalami pokok permasalahan penelitian yang berkaitan dengan gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual dan menggali tanggapan dari informan terpilih. Berikut pertimbangan peneliti ketika memutuskan menggunakan pendekatan kualitatif:

Pertama, dengan alasan praktis bahwa pendekatan kualitatif akan memudahkan peneliti dalam berinteraksi dengan anggota gerakan perempuan. Informan dapat menceritakan kegiatan dan pengalamannya secara lebih leluasa, meskipun tetap mengikuti koridor arahan peneliti.

Kedua, penelitian kualitatif tidak berfokus untuk mencari sebuah jawaban yang benar namun memperoleh data. Informan bebas berargumentatif sesuai permasalahan penelitian, karena tidak ada jawaban benar atau salah.

Ketiga, meskipun fokus penelitian adalah gerakan perempuan namun isu yang menyertainya bersifat sensitif. Hal ini karena kasus kekerasan seksual merupakan hal yang privat dan traumatis. Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa informan. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan kepercayaan informan terkait data-data yang akan diungkapkan, apakah akan disalahgunakan atau untuk tujuan yang baik. Selain itu, informan akan bercerita secara lebih detail dan terbuka

karena telah nyaman dengan peneliti sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif sumber data dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang diberikan oleh informan dalam penelitian. Informasi yang diceritakan terkait gerakan perempuan dan bagaimana peran mereka dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu anggota LSM Savy Amira, anggota organisasi KOPRI Rayon FISIP UIN Sunan Ampel, anggota organisasi KOHATI Rayon FTK UIN Sunan Ampel, dan anggota PKK RW 04 Gresik PPI Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data berwujud gambar dokumentasi yang berkaitan dengan lokasi, waktu dan proses wawancara dengan informan. Sumber data sekunder juga bisa didapat dari referensi buku maupun data dari web untuk melengkapi data yang sesuai dengan tema penelitian.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kota Surabaya dengan menyebar di beberapa tempat yang berkaitan dengan gerakan perempuan, seperti LSM

perlindungan perempuan Savy Amira, organisasi mahasiswa KOPRI Rayon FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, organisasi mahasiswa KOHATI Rayon FTK UIN Sunan Ampel Surabaya dan rumah anggota PKK RW 04 Gresik PPI Surabaya.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah sidang proposal skripsi dilaksanakan dan akan selesai pada tanggal 01 Februari 2021. Berikut tabel jadwal wawancara penelitian:

Tabel 3.1  
Jadwal Wawancara Informan

No	Tanggal	Waktu	Tempat	Nama	Keterangan
1	13 September 2020	16.00-17.00	Rumah anggota PKK	Bu Nurul Fuad	Anggota PKK RW 04 Gresik PPI Surabaya
2	28 Oktober 2020	19.30-20.30	Virtual (Whatsapp)	Erin	Demisioner KOPRI FISIP UINSA
3	05 November 2020	12.00-13.00	Virtual (Whatsapp)	Sirriya	Anggota KOPRI FISIP UINSA
4	08 Januari 2021	16.00-17.00	Virtual (Whatsapp)	Mafida	Ketua KOHATI FTK UINSA
5	01 Februari 2021	09.00-10.00	Virtual (Zoom)	Siti Mazdaifah	Pengurus/ anggota LSM Savy Amira

(Sumber: Observasi dan Wawancara Peneliti, 2020)

### C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian memiliki peran sebagai sumber data dalam penelitian ini. Mewawancarai informan bertujuan untuk menggali data secara mendalam. Subyek dalam penelitian ini antara lain anggota LSM

yang berfokus pada perlindungan perempuan, anggota organisasi mahasiswa, anggota PKK, dan co-founder website yang berfokus pada isu gender.

Metode *purposive* menjadi pilihan peneliti dalam menyeleksi subyek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan data. *Purposive* adalah proses pemilihan informan dengan memperhatikan aspek penguasaan atas informasi data dari informan. Pemilihan informan ini bersifat acak mengikuti kondisi lapangan dan iklim sosial sekitar lingkungan yang akan diteliti dengan tujuan agar penerimaan data yang diambil tidak keluar atau salah sasaran<sup>24</sup>.

Tabel 3. 2  
Subyek Penelitian

NO	Nama	Profesi
1.	Bu Nurul Fuad	Pedagang
2.	Erin	Mahasiswa
3.	Sirriya	Mahasiswa
4.	Mafida	Mahasiswa
6.	Siti Mazdafiah	Ketua LSM

(Sumber: Observasi dan wawancara peneliti, 2020)

#### D. Tahap - Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang masing-masing bagiannya mempunyai sub bagian,<sup>25</sup> sebagai yaitu:

1. Tahap persiapan
  - a. Identifikasi dan memilih masalah/ topik penelitian

<sup>24</sup> Lincoln dan Guba dalam Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 302

<sup>25</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2012), 81

Penelitian merupakan hasil dari keresahan atas suatu permasalahan di lingkungan sekitar yang terjadi secara terus menerus, hal tersebut mampu diamati dan diversifikasi secara nyata ketika penelitian berlangsung. Maka, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mencari permasalahan yang mampu dijadikan topik penelitian serta menarik untuk dikaji. Peneliti pada akhirnya merancang penelitian yang bertema gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual, dimana peneliti mencari data mengenai hal apa saja yang mampu dilakukan oleh gerakan perempuan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

b. Tinjauan kepustakaan

Peneliti memilih teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengkaji penelitian. Selain itu peneliti mencari beberapa referensi penelitian orang lain yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menentukan jalannya penelitian.

c. Merumuskan permasalahan penelitian dan fokus pembahasan

Peneliti merumuskan permasalahan terkait dengan tema penelitian yang diangkat, sebagai dasar dalam mengumpulkan data di lapangan. Rumusan permasalahan ini agar peneliti fokus menggali data terkait tema, tidak bias dalam menentukan apa saja yang akan dijabarkan dalam penelitian.

d. Mengurus surat perizinan

Peneliti melakukan perizinan dengan mengajukan surat kepada pihak akademik fakultas, dan ada beberapa informan yang tidak perlu meneruskan surat izin penelitian kepada pihak terkait. Hal ini dikarenakan peneliti ingin informan bisa terbuka dan menjawab apa adanya tanpa tekanan.

e. Persiapan perlengkapan untuk penelitian.

Peneliti menyiapkan keperluan sebelum melakukan penelitian, antara lain dengan menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan dalam mengumpulkan data. Serta perlengkapan dokumentasi ketika melakukan wawancara sebagai bukti yang akan dilampirkan.

2. Tahap pelaksanaan

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti sudah menyelesaikan persiapan pra-penelitian, dan terjun ke lapangan untuk menghimpun data terkait penelitian. Disini diperlukan kemampuan dalam menilai dan memahami karakter informan agar hasil wawancara yang diperoleh bisa lebih mendalam. Selain itu peneliti harus berhati-hati serta menata kata-kata agar tidak menyinggung informan.

b. Pengolahan data

Setelah mengumpulkan data di lapangan, peneliti akan mengolah data tersebut. Data akan dienkripsi dalam bentuk tulisan

sesuai dengan apa yang disampaikan informan di lapangan untuk menjaga keotentikan data.

c. Penganalisisan data

Peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh sebelumnya dan mendalami tema yang diangkat. Tahap ini menggunakan teori yang telah dipilih sebelumnya untuk menganalisis data.

3. Tahap penyelesaian

a. Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian ditulis sesuai dengan prosedur standar kepenulisan penelitian yang telah disusun oleh akademik kampus agar laporan penelitian sistematis dan tertata.

b. Presentasi

Peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya selama kurang lebih tiga bulan kepada dosen penguji.

c. Saran

Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang maksimal maka diperlukan saran, untuk itu diperlukan perbaikan dan pengurangan jika dibutuhkan. Selain itu karena penelitian ini akan dijadikan referensi oleh peneliti lainnya yang akan membahas tema yang serupa.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan pertanyaan berdasarkan tema penelitian ke seseorang yang menjadi informan atau responden.<sup>26</sup> Bentuk wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur yaitu *interviewer* mengajukan sederet pertanyaan yang sudah disusun dalam pedoman wawancara kepada *interviewee* guna menggali data yang dibutuhkan dan mencatat poin-poin penting. Ketika melakukan wawancara menggunakan bahasa yang biasa digunakan tetapi tetap formal dengan mempertimbangkan aspek keformalan.

Dalam kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka dan aturan jaga jarak, maka sebuah tantangan tersendiri ketika melakukan wawancara. Ada beberapa opsi yang sekiranya digunakan dalam penelitian ini yaitu tatap muka secara langsung dan virtual. Ketika kondisi memungkinkan dapat dilakukan wawancara secara langsung maka peneliti melakukannya dengan protokol kesehatan yang telah diatur oleh WHO. Namun ketika tidak memungkinkan maka dilakukan wawancara secara daring melalui

---

<sup>26</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 131



*video call*, berbalas pesan atau bertukar surel. Metode wawancara dalam situasi yang seperti ini mungkin sedikit berbeda dari biasanya karena ada beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan antara lain ketersediaan internet, kekuatan jaringan dan waktu yang kondusif.

Langkah awal penelitian dimulai pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan melakukan observasi untuk melihat situasi dan objek penelitian yang pertama yaitu di Gresik PPI. Selama pandemi covid-19 peneliti yang sudah tergabung dengan organisasi karang taruna ikut aktif dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak. Perlu diketahui sebelumnya bahwa mayoritas warga merupakan pedagang di sepanjang jalan Gresik PPI yang terkena imbas *lockdown* berskala kecil. Seiring berjalannya kegiatan penyaluran bantuan dari berbagai pihak, terjalin komunikasi dan kerjasama dengan anggota PKK RW 04. Salah satu anggota yang cukup aktif adalah Bu Nurul. Peneliti melakukan pendekatan dengan mengumpulkan informasi kegiatan yang dilakukan PKK selama pandemi. Lalu pada tanggal 11 September 2020 beliau mengajak peneliti untuk mengikuti kegiatan penyuluhan cuci tangan yang dilakukan oleh Puskesmas Pesapen bersama ibu-ibu PKK dan warga sekitar. Hal ini untuk lebih mengakrabkan diri dengan anggota PKK, agar memahami lebih jauh bagaimana corak gerakan dan pola kebudayaan yang terbentuk di dalamnya. Barulah tanggal 13 September 2020 peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan Bu Nurul. Pada sesi wawancara ini peneliti mengulik informasi terkait

gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di lingkup Rukun Warga. Karena bagaimanapun juga berdasarkan data kekerasan seksual yang terjadi didominasi kekerasan domestik.

Tanggal 28 Oktober 2020 peneliti melakukan wawancara dengan Demisioner KOPRI FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya yang bernama Erin. Dia pernah menjabat sebagai ketua di organisasi tersebut. Disini peneliti tertarik untuk mewawancarainya karena kesepahaman kultur perjuangan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di tingkat fakultas. Maka ia-pun membeberkan hal-hal yang terkait kegiatan organisasinya di fakultas. Selanjutnya Erin menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada Sirriya yaitu anggota yang masih berstatus aktif. Sehingga pada 05 November 2020 peneliti menghubungi untuk bertanya kegiatan terkini KOPRI agar melengkapi informasi yang telah dihimpun sebelumnya. Informan juga membagikan dokumentasi terkini sehubungan kegiatan yang dijalankan.

Tanggal 26 Januari 2021 peneliti mewawancarai anggota KOHATI untuk mendapatkan pandangan yang berbeda terkait gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Wawancara ini bertujuan memperbanyak data yang telah didapatkan peneliti sebelumnya serta untuk membandingkan dengan jawaban narasumber sebelumnya. Peneliti ingin mengetahui corak gerakan perempuan yang berada di fakultas yang berbeda.

Tanggal 28 Januari 2021 peneliti melakukan konfirmasi jadwal wawancara dengan pegiat LSM Savy Amira. Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2021 peneliti melakukan wawancara terkait LSM Savy Amira dan keterlibatannya dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya.

## 2. Observasi

Kegiatan observasi berupa pengamatan secara langsung dan teratur guna memperoleh data terkait penelitian.<sup>27</sup> Observasi pra-penelitian berisi kegiatan peninjauan lokasi, penjajagan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan menyusun rancangan penelitian dan kemungkinan akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Karena pandemi covid-19 yang mengharuskan masing-masing orang untuk menjaga jarak dan meminimalisir kontak sosial, maka peneliti memantau kegiatan dan keadaan sekitar lokasi melalui akun media sosial subjek penelitian. Kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara sehingga mampu mendapatkan informasi seperti apa gerakan perempuan di Surabaya dalam melawan kekerasan seksual yang terjadi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah komponen pelengkap dalam penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa yang telah berlalu seperti gambar,

---

<sup>27</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2008), 94

<sup>28</sup> Sri Kumalaningsih, *METODE PENELITIAN: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Malang:UB Press, 2012) 41

tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Tujuan dari adanya dokumentasi adalah agar dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan tanpa rekayasa. Bentuk dokumentasi antara lain yaitu foto, memo, dan arsip. Peralatan dokumentasi yang diperlukan guna penelitian ini yaitu buku catatan dan ponsel.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan beberapa proses antara lain:

##### **1. Penyajian Data**

Dalam langkah ini hasil penelitian yang telah diperoleh dihubungkan dengan teori pilihan peneliti. Data yang diperoleh ketika di lapangan akan disortir kepada hal-hal yang penting dan memiliki relevansi tinggi dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara menganalisis data lapangan.

##### **2. Verifikasi**

Verifikasi adalah langkah terakhir sesudah mencapai kesimpulan. Dalam perjalanannya, kesimpulan yang dihasilkan masih sementara. Jika terdapat bukti yang mematahkan kesimpulan maka hasil kesimpulan akan berubah.

---

<sup>29</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 117

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan komponen penting dalam penelitian. Hal ini akan menjadi indikator bahwa penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pendekatan triangulasi yaitu pencarian yang efisien dalam pengujian data yang telah ada guna meningkatkan tafsir dan meningkatkan penelitian yang berbasis pada bukti nyata.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Definisi triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan komponen lain sebagai perbandingan antara hasil wawancara dengan objek penelitian. Triangulasi berguna dalam menguji validitas penelitian terhadap data dikarenakan triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi dapat dilakukan dengan membuktikan kembali keabsahan hasil data yang telah diperoleh selama di lapangan. Tata cara melakukannya adalah dengan menanyakan kembali atau *cross check* ke narasumber yang berbeda terkait data yang telah diperoleh. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, atau melakukan perbandingan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## **BAB IV**

### **GERAKAN PEREMPUAN DALAM MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DI SURABAYA**

#### **A. Gerakan Perempuan di Surabaya**

Diskriminasi terhadap perempuan berada pada aspek institusional, struktural, dan kultural. Karena hal tersebut gerakan perjuangan terhadap diskriminasi yang diterima perempuan timbul sebagai kesadaran kelompok bukan individu. Kelompok ini lalu menolak subordinasi serta tekanan yang terwujud dalam aksi kolektif terhadap politik, budaya, dan individu.<sup>30</sup> Sistem patriarki yang banyak merugikan perempuan dan kelompok marginal sewajarnya tergerus pemikiran berperspektif gender. Namun realita yang terjadi adalah masih banyaknya diskriminasi yang dialami perempuan maupun kelompok marginal lainnya, baik di ruang publik dan domestik karena perkara tersebut.

Berbagai macam permasalahan yang dihadapi perempuan di Surabaya terkait topik penelitian ini antara lain seperti kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dalam berpacaran. Korban kekerasan seksual yang pernah peneliti temui pada awalnya menyangkal tindakan tersebut, mereka memaafkan derita fisik dan psikis yang diterima atas nama cinta. Namun tindakan tersebut terus berulang disertai ancaman agar tidak menyebar aib. Ada juga kasus yang melibatkan perempuan dengan keterbatasan akses ekonomi. Korban sebelumnya tidak mendapat

---

<sup>30</sup> Abrams, K 1999, *From autonomy to agency: Feminist perspectives on self-direction*, (William & Mary Law Review, vol. 40, issue 3), 807.

kesempatan untuk ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan hidupnya, yang ia tahu hanya menuruti kehendak orang lain. Pada akhirnya ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, ia tak mampu lepas dari belenggu tersebut karena ketergantungan secara finansial dan emosional. Kehidupan seorang perempuan yang mengalami kekerasan jika diibaratkan seperti hidup dalam lingkaran setan yang tidak bisa putus. Salah satu usaha yang mampu dilakukan perempuan dalam menanggapi situasi tersebut adalah melakukan aksi kolektif.

Aksi kolektif perempuan sudah berjalan sejak abad 20-an di berbagai daerah Indonesia. Seperti yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya bahwa gerakan perempuan di Indonesia adalah bentuk perjuangan dalam mengartikulasikan keprihatinan akan status, pengalaman diskriminasi dan penindasan yang mereka terima melalui keikutsertaan dalam organisasi perempuan. Gerakan perempuan yang ada di Surabaya ini dimaknai sebagai pembentukan dan aktivitas dari kelompok yang memiliki tujuan memberikan perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Dalam hal ini mempengaruhi perubahan dengan pembentukan dan pemeliharaan organisasi yang bersifat sukarela sekaligus keputusan kelompok untuk bergerak secara kolektif.<sup>31</sup>

Gerakan perempuan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi LSM Savy Amira, KOHATI, KOPRI, dan PKK. Tiap gerakan perempuan

---

<sup>31</sup> Pandolfelli, Meizen-Dick & Dohrn, *Gender and Collective Action: A Conceptual Framework for Analysis*, (CAPRI Working Paper No.64), 3

tersebut mewakili tipe dan ideologi yang berbeda-beda. Fokus gerakan secara keseluruhan adalah mendorong keterbukaan akses perempuan pada layanan pengaduan dan pendampingan, pemulihan, pengembangan keyakinan diri, pengetahuan dan keterampilan. Gerakan perempuan itu dalam mencapai cita-citanya menggunakan konsep pemenuhan hak. Misalnya hak perempuan untuk merasa aman di ruang domestik maupun publik, hak perempuan atas keterwakilan di bidang yang digeluti, hak menyuarkan pendapat, hak atas kesehatan reproduksi dan hak ekonomi. Serta partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan untuk mengadvokasi isu yang dihadapi perempuan.

Tabel 4. 1  
Gerakan Perempuan dan Fokus Gerakan

Gerakan	Fokus Gerakan
LSM Savy Amira	Memberikan ruang aman bagi perempuan korban kekerasan dengan mempertimbangkan aspek gender
KOPRI	Memberikan ruang berproses bagi kader perempuan yang sebelumnya terbatas dalam aspek struktural.
KOHATI	Mengembangkan potensi kader perempuan dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
PKK	Wadah inovasi masyarakat dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

(Sumber: observasi dan wawancara peneliti)

Penelitian atas keempat gerakan perempuan menemukan setidaknya dua jenis tipe gerakan yaitu: tipe A (gerakan yang berfokus pada pendampingan korban) dan tipe B (gerakan *empowering* atau pemberdayaan).



1. Gerakan perempuan tipe A (gerakan pendampingan korban)

Gerakan tipe A yang berfokus pada pendampingan korban ini memiliki karakteristik berupa penyediaan bantuan bagi korban kekerasan yang berperspektif perempuan. Bantuan yang diberikan kepada korban-pun bermacam-macam, mulai dari aspek psikologis hingga hukum.

Gerakan tipe ini terlihat jelas pada LSM Savy Amira. Didirikan pada 25 November 1997 Savy Amira atau sahabat perempuan merupakan lembaga non-profit yang digagas sekumpulan aktivis perempuan. Ide berdirinya organisasi berangkat dari sebuah pelatihan Feminist Counselling yang diselenggarakan di Jawa Barat. Ketiga peserta perempuan dari Surabaya yang mengikuti pelatihan, mencetuskan ide membantu korban kekerasan. Langkah awal yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan pertemuan kecil yang terbuka bagi siapapun yang memiliki perhatian khusus pada permasalahan ini. Pertemuan ini dinamakan Reboan, karena diadakan tiap hari Rabu dan berlangsung selama 6 bulan. Hingga pada akhirnya meraih kesepakatan dengan mendirikan *women's crisis center* yang bernama Savy Amira.

Savy Amira mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan topangan swadana serta sumbangan dari masyarakat. Penyediaan layanan awalnya dibuka melalui saluran telepon pribadi oleh 5 orang

anggota paruh waktu secara bergilir selama 24 jam. Hingga tahun 2001, LSM ini akhirnya mampu mengontrak rumah sebagai sekretariat dan rumah aman sementara. Kemajuan itu tak luput dari bantuan kelompok filantropis di Surabaya, simpati dan dukungan dari individu-individu serta bantuan para relawan. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, LSM Savy Amira semakin menjadi tempat rujukan dalam proses pendampingan psikologis dan hukum. Program penguatan dukungan masyarakat juga berjalan baik, sejalan dengan kegiatan pelatihan maupun pelatihan advokasi kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.<sup>32</sup>

Pernyataan terkait tujuan dan dasar berdirinya Savy Amira juga ditegaskan oleh Ketua LSM yaitu Bu Siti Mazdafiah sebagai berikut:

“Savy Amira bertujuan menciptakan ruang aman. Jadi dimanapun kita berada baik di rumah, di jalan maupun di tempat kerja, perempuan harus bisa merasa aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini pada dasarnya sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM (hak asasi manusia) bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Hal itu dibangun dalam prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang menghargai keberagaman.”<sup>33</sup>

Dalam tercapainya perkembangan positif penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan, penanganan kasus harus selalu dipantau dan dikoordinasikan secara berkala. Untuk itulah Savy Amira ini didukung oleh beberapa anggota yang menangani kegiatan pengorganisasian. Status kenggotan mereka terbagi menjadi dua yaitu staf tetap dan *volunteer* dan relawan. Staf tetap akan terbagi lagi menjadi

---

<sup>32</sup> [www.savyamirawcc.com/tentang-kami/profil/](http://www.savyamirawcc.com/tentang-kami/profil/)

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bu Siti Mazdafiah melalui aplikasi zoom

beberapa divisi. Sedangkan anggota *volunteer* atau relawan biasanya diisi oleh mahasiswa magang maupun orang-orang yang mempunyai panggilan jiwa di gerakan perempuan namun terkendala waktu. LSM Savy Amira terbagi ke dalam divisi-divisi yang ada antara lain:

a. Penanganan kasus

Bertujuan menguatkan korban dalam membuat keputusannya sendiri maupun orang yang bergantung padanya agar terbebas dari lingkaran kekerasan.

b. Penguatan dan dukungan masyarakat

Bertujuan membangun kepercayaan, sikap dan respon positif masyarakat, termasuk para pengambil keputusan agar terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

c. Penelitian dan pelatihan

Bertujuan menyediakan data untuk mendukung program advokasi kebijakan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berperspektif pemberdayaan perempuan.

Latar belakang berdirinya Savy Amira merupakan bentuk dukungan dalam membantu pendampingan perempuan korban kekerasan. Wilayah jangkauan Savy Amira tidak hanya terbatas di kota Surabaya namun juga sekitarnya. Sejak tahun 2012 Savy Amira dan 96 lembaga pengada layanan yang tersebar di 30 provinsi membentuk Forum Pengada Layanan. Hingga saat ini anggota yang tergabung sebanyak 122 lembaga pendamping dari 32 provinsi di Indonesia yang

memberikan dampingan hukum, psikologis, ekonomi dan sosial. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Bu Siti Mazdaifah sebagai berikut:

“Savy Amira itu LSM yang inisiatifnya dari beberapa perempuan yang concern menghapuskan kekerasan perempuan. Selain Savy Amira banyak lembaga sejenis seperti di Pasuruan ada WCC Pasuruan, di Jombang ada WCC Jombang lalu di Tuban ada Koalisi Perempuan Ronggolawe. Mereka ini sepakat berada di bawah naungan Forum Pengada Layanan. Jadi banyak sekali lembaga yang tergabung di Savy Amira. Kebetulan Savy Amira menggabungkan diri dengan Forum Pengada Layanan Indonesia.”<sup>34</sup>

Selanjutnya pada tahun 2016 Savy Amira bersama dengan 8 lembaga pemberi layanan yang berada di Kediri, Jombang, Malang, Tuban, Lamongan, Pasuruan, dan Surabaya sepakat mendirikan Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Jangkar PKtPA) Jawa Timur. Tujuan didirikan jaringan tersebut adalah agar mampu saling menguatkan penanganan kasus perempuan dan anak di regional Jawa Timur.

Setelah dijelaskan relasi antara Savy Amira dengan lembaga atau organisasi NGO (*Non Governance Organization*), peneliti menanyakan seperti apa posisi Savy Amira terhadap lembaga perlindungan perempuan milik pemerintah yaitu Komnas Perempuan dan bagaimana alur kebijakannya, sebagai berikut:

“Komisi Nasional Perempuan merupakan komisi bentukan pemerintah yang tugasnya mengawasi bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sementara ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan, jadi penanganan dilakukan oleh NGO

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bu Siti Mazdaifah melalui aplikasi zoom

seperti Savy Amira. Hingga kemudian pemerintah membentuk P2TP2A di tingkat kabupaten dan PPT di tingkat provinsi, agar semua pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan bisa datang, lapor dan ditangani oleh pemerintah.”

Meskipun telah dibentuknya lembaga perlindungan perempuan di tingkat kabupaten dan provinsi, ternyata masih banyak juga korban yang memilih untuk melapor di Savy Amira. Salah satu faktor penyebab korban enggan pergi ke lembaga pemerintah adalah keamanan privasi. Ketika korban memilih untuk melapor maka ia juga harus bersiap menyerahkan data dirinya agar tercatat dalam data lembaga tersebut. Selain itu, lembaga terkait akan membagikan informasi pelaporan kepada keluarga atau wali korban. Sedangkan pada beberapa kasus, ada juga korban yang menjaga agar kasus yang dialaminya tidak diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu perempuan yang mengalami kekerasan seksual lebih banyak melapor ke NGO seperti Savy Amira daripada ke lembaga milik pemerintah.

## 2. Gerakan tipe B (gerakan *empowering* atau pemberdayaan)

Gerakan tipe B yang berfokus pada pemberdayaan memiliki karakteristik berupa penyediaan ruang atau wadah bagi perempuan dalam mengembangkan potensi dirinya serta mendorong tindakan pencegahan kekerasan seksual dengan berbagai kajian yang berperspektif gender.

Pemberdayaan perempuan seperti konsep program MAMPU mengutip kerangka milik Rowland sebagai berikut:

Tabel 4. 2  
Kerangka Pemberdayaan

Aset Manusia (Kekuatan dalam)	Akses kepada layanan dan informasi kesehatan, pendidikan, literasi, numerasi
	Liberasi keuangan
	Pengatahuan tentang HAM (hak asasi manusia) dan hak hukum
	Keterampilan yang berguna untuk mencari kerja
Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)	Uang tunai, pendapatan dan tabungan
	Akses kepada pinjaman
	Kupon/ voucher, peralatan/input
	Ternak dan persediaan barang
	Usaha dan informasi pasar
Aset Kapasitas (Kemampuan untuk)	Partisipasi dalam keputusan ekonomi di keluarga dan pengambilan keputusan dalam masyarakat
	Mengakses layanan dan perlindungan sosial, serta peluang kerja dan pendapatan
	Berhubungan dengan pasar, termasuk dengan agen penempatan pekerja migran dan pemberi kerja
Aset Sosial (Kemampuan dengan)	Teman, jaringan sosial
	Mentor keanggotaan kelompok
	Hubungan dengan pemerintah desa, kabupaten dan penyedia layanan
	Hubungan dengan masyarakat sipil dan kelompok lainnya

(Sumber: Konsep Power Rowlands oleh program MAMPU)<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Anne Lockley, dkk, *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia*, (Jurnal Perempuan Vol. 24 No. 1, 2019), 18.

Pentingnya akses perempuan terhadap keuangan, sumber daya, serta sosial merupakan hak dasar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini jika tidak atau kurang terpenuhi akan membawa dampak alienasi, terpinggirkannya posisi perempuan. Namun tidak serta merta seperti yang ditakutkan oleh beberapa golongan bahwa perempuan berusaha merebut kapital laki-laki.

Gerakan tipe B ini memiliki latar belakang tersendiri yaitu, berdasarkan catatan Savy Amira dan yang ternyata senada dengan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual serta berulangnya kasus tersebut adalah faktor ekonomi. Korban seringkali bergantung kepada pelaku dalam urusan ekonomi maupun sosial dimana ia tidak mampu mengakses kedua hal tersebut. Maka, gerakan ini lahir untuk membantu perempuan memenuhi hak dasar sebagai seorang warga masyarakat.

Gerakan tipe B tampak pada gerakan perempuan KOPRI, KOHATI, dan PKK. Masing-masing organisasi tersebut memiliki ideologi dan tujuan yang berbeda-beda, berikut deskripsi tiap organisasi:

a. KOPRI (Korp PMII Putri)

Korp PMII Putri merupakan bagian dari PMII yang secara khusus memiliki tugas mengembangkan dan memberdayakan perempuan dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

KOPRI berdiri pada Kongres III PMII yaitu pada 7 sampai 11 Februari 1967 di Malang. Awalnya sekretariat KOPRI pusat berada di Jakarta lalu dipindahkan ke Surabaya dengan pengelolaan yang diserahkan kepada PW PMII Jawa Timur. Musyawarah Nasional KOPRI yang pertama digelar di Makassar pada 25 sampai 30 April 1970. Namun perjalanan organisasi ini mengalami pasang surut, dengan dibubarkan sebanyak dua kali. Pembubaran pertama disebabkan karena kepengurusan tidak pernah mengadakan kegiatan serta tidak adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kedua kalinya dikarenakan hasil voting yang menyatakan bahwa KOPRI harus dibubarkan. Karena tidak ingin mengulang stagnansi berkepanjangan dan pengorganisasian yang tidak menentu, maka dibentuklah kembali wadah yang menaungi kader perempuan PMII. Proses ini terlaksana pada 29 September 2003 di Jakarta.

Mantan Ketua KOPRI Rayon FISIP mengungkapkan latar belakang berdirinya organisasi serta posisi KOPRI dalam menanggapi sebuah permasalahan perempuan sebagai berikut:

“Awal berdirinya memang agar kader putri tidak kehilangan ruang atau merasa kalah saing dengan kader laki-laki. Karena emang-kan masih butuh disadarkan. Trus setiap ada isu keperempuanan seharusnya KOPRI hadir disitu. Entah pelecehan seksual, kekerasan seksual, sebagainya. Itu juga tetap jadi suatu pembahasan permasalahan yang harus di-*backup* oleh KOPRI”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Erin melalui *whatsapp*



Jika mengacu pada kerangka pemberdayaan perempuan, ada yang dinamakan aset manusia atau aset individu yang mencakup perubahan kesehatan dan pendidikan pribadi, keterampilan dan pengetahuan. Hal itu termasuk literasi, numerasi, pendapatan dan keterampilan untuk bekerja serta rasa keyakinan diri dan percaya diri di tingkat individu. Percaya diri adalah awalan yang penting bagi perempuan, apalagi yang berasal dari tempat yang didominasi laki-laki dan perebutan struktural.

Kerja yang dilakukan KOPRI merupakan perlawanan terhadap stigma negatif yang melekat pada kader perempuan dengan menguatkan aspek individu:

“Fokus kajian kembali sedini mungkin, gimana teman-teman bisa aktif dan biar sama-sama sadar kalo kita bisa jadi perempuan yang gak dianggap cuma wangi-wangian di organisasi. Dan kalau ada masalah bisa dibantu KOPRI tentang apapun itu yang biasanya dianggap tabu seperti pelecehan seksual kalian bisa cerita. Karena kita sama-sama perempuan kalo misal cerita ke laki-laki kan mungkin bakalan risih.”<sup>37</sup>

Kemajuan dan perkembangan KOPRI dalam perjalanannya tidak luput dari tujuan KOPRI yaitu terbentuknya pribadi muslimah Indonesia yang berbudi luhur, berilmu dan bertaqwa dalam mengamalkan ilmu pengetahuan menuju masyarakat Pancasila. Kerangka strategi dalam pembangunan KOPRI yaitu:

Berdasarkan kemampuan bergerak maka KOPRI menempatkan dirinya di dua titik. Hal tersebut adalah transformasi

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Erin melalui *whatsapp*

pengetahuan ke kader dan masyarakat serta melakukan advokasi baik sendirian maupun melalui jaringan potensial. Dalam titik transformasi pengetahuan bisa dilakukan diskusi yang mengkaji ilmu pengetahuan tentang keperempuanan juga permasalahan yang dihadapi perempuan. Setelah berjalannya transformasi pengetahuan dimana kader telah mendapatkan bekal yang cukup maka bisa dilakukan proses advokasi.

Strategi ini telah dijalankan oleh KOPRI Rayon FISIP UIN Sunan Ampel seperti yang diutarakan oleh demisioner KOPRI sebagai berikut:

“Dulu pernah ada kasus pelecehan sama dosen, itu jadi fokus kajian. Tapi-kan permasalahan struktural gitu tergantung korbannya gimana, mau dibawa kemana. Tapi kalau kemarin aku sama yang lain lagi fokus disitu. Soalnya emang lagi ada beberapa masalah yang ternyata dekat banget buat kita bahas tentang pelecehan seksual.”<sup>38</sup>

Menyambung permasalahan yang menjadi fokus kajian KOPRI Rayon FISIP tersebut, kurang kuatnya jaringan internal maupun eksternal yang dimiliki menghambat gerak organisasi. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada pemberdayaan kader perempuan saja tetapi perempuan lainnya juga. Yang dimaksud dengan jaringan internal adalah lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan PMII serta jaringan alumni PMII. Sedangkan jaringan eksternal adalah lembaga-lembaga yang berada diluar

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Erin melalui aplikasi Whatsapp

PMII, dengan contoh lembaga birokrasi dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan.

“Karena kita tingkat kepengurusan Rayon jadi tidak ada *backing* dari manapun. Karena isu yang kemaren kita ambil itu setingkat fakultas maka kita bisa selesaikan sendiri. Dari kepengurusan KOPRI dibantu SEMA, DEMA kita selesaikan disitu. Karena kita masih belum ada *channel* atau *link* ke LSM-LSM dan lain sebagainya.”<sup>39</sup>

Tanpa berjejaring atau terlibat relasi dengan gerakan perempuan lainnya maka KOPRI tidak akan dikenal dan tidak bisa mendapat kepercayaan publik serta tidak bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan perempuan. Maka dari itu KOPRI FISIP berjuang membangun relasi agar dalam penyelesaian kasus maupun proses edukasi mendapatkan bantuan dari pihak yang telah berpengalaman serta profesional, dengan hasil wawancara sebagai berikut ini:

“Jadi kita membangun relasi ke sesama KOPRI yang lintas rayon. Untuk tingkat universitas, kota dan provinsi kita masih memperkenalkan diri. Karena umurnya masih muda banget, baru tiga tahun. Kalo kita udah berhasil bangun relasi KOPRI lintas rayon, universitas atau universitas lain bahkan ke kota lain kita bisa dapat bantuan dari mereka. Karena KOPRInya udah lama, udah kuatlah hitungannya, relasinya mereka bukan main kalo dibanding KOPRI FISIP. Jadi kita bisa minta bantuan kalo semisal ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan entah itu karena kekurangan SDM buat memecahkan suatu isu atau buat mengedukasi teman-teman FISIP, kita bisa minta tolong ke mereka. Beberapa dari mereka yang tingkat cabang atau kota udah bisa akses ke LBH.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Erin melalui aplikasi Whatsapp

<sup>40</sup> Ibid

Gerakan perempuan KOPRI merupakan sarana penghubung antara perempuan dengan layanan sosial dan pemangku kebijakan dengan menjalin relasi ke lembaga lain yang mendekatkan perempuan pada akses layanan advokasi hak-hak perempuan dalam kampus.

b. KOHATI (Korps HMI-Wati)

KOHATI merupakan Badan Khusus HMI yang menjadi wadah pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader perempuan HMI dalam wacana dan dinamika keperempuan. Dalam struktur internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan di tingkat eksternal HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi mahasiswi. Keanggotaannya haruslah mahasiswi yang telah dinyatakan lulus Latihan Kader (LK) I. KOHATI memiliki fokus peningkatan kapasitas dan kualitas kader HMI-Wati dengan misi, terbinanya muslimah berkualitas insan cita yaitu insan yang berwawasan akademik baik, pencipta sekaligus pengabdian yang menjunjung nilai-nilai Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Sejarah berdirinya organisasi perempuan ini dimulai pada tahun 1966 di Makassar. Saat itu HMI-Wati yang tergabung dalam seksi keputrian cabang mendirikan Corps Keputrian yang disingkat CK. Lalu pada 11 Juni 1966 Pengurus Besar HMI mengeluarkan

SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen, yang menginstruksikan dibentuknya KOHATI di setiap cabang, komisariat, dan rayon. Munas Kohati pertama berlangsung tanggal 10 sampai 17 September 1966. Dengan hasil didirikannya KOHATI pada tanggal 17 September 1966. Selain itu ada tiga keputusan munas yaitu ditetapkannya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Kohati, program kerja, dan rekomendasi munas.

Hal yang melatarbelakangi pendirian KOHATI disampaikan oleh anggota HMI-Wati rayon FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai berikut:

“Latar belakang ada dua secara internal dan eksternal. Kalau secara internal, waktu itu belum ada Kohati namanya departemen keputrian. Mereka ini yang menaungi kader perempuan di HMI, jumlah anggota perempuan sangat banyak dan membludak sehingga departemen keputrian yang ada sudah tidak mampu untuk menampung aspirasi kader HMI-Wati. Selain itu *basic needs* atau kebutuhan dasar dari anggota HMI-Wati tentang berbagai permasalahan perempuan kurang bisa difasilitasi oleh HMI. Kalau secara eksternal, banyak organisasi masuk melalui pintu gerakan perempuan seperti GERWANI. Maka HMI merapatkan barisannya dengan terlibat aktif dalam kancah gerakan perempuan yang berbasis organisasi perempuan”<sup>41</sup>

Latar belakang berdirinya KOHATI menjadi bukti adanya pemberdayaan kapasitas (*agency*) yang telah tercapai. Ditunjukkan dengan KOHATI yang terlibat aktif dalam memberikan gagasan dan aspirasi dalam berjalannya organisasi. Bahkan harus

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Mafida melalui whatsapp

disediakan wadah yang baru dan khusus bagi anggota kader yang memiliki jumlah sangat banyak.

KOHATI sebagai bagian dari gerakan perempuan yang mendorong pembentukan opini, mempunyai isu keperempuanan yang hendak ditawarkan menjadi wacana gerakan yaitu menanggapi permasalahan perempuan secara cerdas dengan menggunakan perspektif Islam melalui pendekatan sosio kultural, juga peningkatan kemampuan dasar perempuan. Deskripsi wawancara sebagai berikut:

“Karena ada pandemi, kegiatan KOHATI dengan melibatkan perempuan atau mahasiswi UINSA sendiri masih sebatas mengadakan kajian keperempuanan online yang dibuka untuk umum dan diikuti oleh mahasiswa maupun mahasiswi UINSA khususnya Tarbiyah. Kalo sebelum-sebelumnya pernah ada kegiatan sebar pita merah dan brosur tentang HIV/ Aids di lingkungan fakultas Tarbiyah. Kemudian ada pemaparan singkat ke orang-orang yang lewat itu, dilanjutkan dengan menulis pesan satu dua kata tentang HIV/ Aids.”<sup>42</sup>

Kajian keperempuanan online yang mereka lakukan memiliki tema yang beragam seperti yang pernah penulis lihat di akun media sosial, membahas tentang kepemimpinan perempuan. Tema seperti ini menawarkan pemikiran berbasis gender dimana perempuan tidak hanya berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar namun juga pengembangan diri. Selain itu juga menegaskan posisi perempuan yang setara dengan laki-laki, dengan harapan kader HMI mampu mendorong atau

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Mafida melalui whatsapp

menghapuskan diskriminasi dan subordinasi terhadap kader perempuan.

Jika sudah muncul kesadaran pentingnya kesetaraan gender dalam sebuah organisasi akan timbul lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Apa jadinya jika gerakan akar rumput bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, maka tindakan kekerasan seksual akan dianggap hal yang lumrah.

Ketika menjelajah lebih jauh akun publisitas KOHATI, selain forum diskusi mereka juga cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan berbagai gerakan sosial lainnya. Seperti yang dikutip dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi kita memang kerjasama sama Maulana Malik Foundation untuk bagi-bagi nasi bungkus tiap malam Jumat. Targetnya tukang becak, orang-orang tuna wisma, dan lain-lain gitu. Selain itu, kita juga pernah kerjasama sama Natha Aruna, komunitas peduli anak jalanan dan marjinal. Lokasinya di daerah makam rangkah, kegiatannya bakti sosial.”<sup>43</sup>

Menanggapi hal tersebut peneliti menanyakan latar belakang kegiatan sosial yang ternyata selain untuk membantu meringankan beban, juga bertujuan meningkatkan *awareness* kader dan lingkungan sekitar bahwa kelompok masyarakat marjinal merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual yang harus dipedulikan bersama. Selama ini kasus kekerasan seksual maupun fisik yang dialami oleh tuna wisma, anak jalanan dan lainnya seringkali luput dari pembahasan. Hal ini karena kurangnya kepedulian terhadap kelompok tersebut, belum lagi mereka kesulitan mendapat akses untuk meminta bantuan. Maka

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Mafida melalui whatsapp

dari itu sudah seharusnya mahasiswa dan gerakan akar rumput lainnya mengawal kasus semacam ini.

c. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan bentukan pemerintah yang bertugas dalam agenda pembangunan masyarakat. Pengelolaannya berprinsip dari, oleh dan untuk masyarakat demi terwujudnya keluarga yang sejahtera.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berfungsi sebagai wadah yang menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut berarti PKK yang akan menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKK sebagai gerakan perempuan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan, bahkan bisa dikatakan berhasil di beberapa wilayah.

“Yang saya tahu mbak, PKK ini kelompok yang mengajak ibu-ibu dan perempuan wis nikah buat mbentuk organisasi. Ya kalo dilihat kan, apalagi sama anak muda paling kelihatannya kumpul-kumpul buat arisan. Padahal disitu jadi tempat perempuan ini saling cerita dan bahas permasalahan kampung. Bisa bertukar pikiran gitu lho mbak. Lumayan buat *refreshing* juga.”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bu Nurul Fuad



Gerakan PKK dimulai dengan adanya seminar *Home Economic* di Bogor pada tahun 1957. Hingga tahun 1961 disusunlah pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga yang terdiri dari hubungan intra dan antara keluarga, *child care* atau membimbing dan mengasuh anak, makanan, pakaian, *housing* atau rumah, kesehatan, keuangan keluarga, *home management* yaitu tatalaksana rumah tangga, *security* berupa keamanan lahir dan batin, dan *sound planing* yaitu perencanaan sehat.<sup>45</sup>

Kemudian hari, tanggal 27 Desember 1972, redaksional pendidikan diubah menjadi pembinaan. Program pembinaan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Selain itu, tepat pada hari yang sama yaitu di tanggal 27 Desember dijadikan sebagai hari Kesatuan Gerakan PKK.

PKK merupakan gerakan perempuan yang penting bagi pemerintah karena penegak antara negara dengan perempuan, sekaligus mitra yang bertugas membantu pemerintah dalam usaha pembangunan di skala mikro. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bu Nurul sebagai berikut:

“PKK RW kita ini maju, mbak. Kalo ada apa-apa pihak Kelurahan, Puskesmas, dari Pemkot langsung hubungi kita. Pernah ya yang waktu itu PKK kita dijadikan percontohan kampung apotek hidup. Kita dikasih bantuan itu mbak, ga cuma buat beli

---

<sup>45</sup> Tim Penggerak PKK Pusat, *Hasil Rapat Kerja Tahunan VII PKK Tahun 2010* (Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat), 23

kembang tapi yo buat modal produk wirausaha ibu-ibu PKK, sama kostum daur ulang biar keliatan semarak.”<sup>46</sup>

Jika dilihat lebih detail lagi kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anggota PKK ini sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan menunjukkan eksistensi mereka di ruang publik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan perempuan terjebak dalam hubungan yang beracun adalah karena tidak memiliki kekuatan sendiri untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ia tergantung secara ekonomi dan emosional dengan pelaku. Adanya program tersebut diharapkan menjadi tindakan preventif terhadap kemungkinan terburuk kedepannya.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Melawan Kekerasan Seksual**

### **1. LSM Savy Amira Surabaya**

Cara menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan seksual menurut Ketua Savy Amira dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat preventif atau pencegahan dan penanganan. Dalam rangka menyediakan bantuan kepada korban kekerasan seksual atau sebagai langkah penanganan, peneliti menanyakan ke ketua LSM langkah awal apa yang diambil ketika menemui korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

“Ketika perempuan mendapatkan kekerasan, kami menyediakan diri untuk memberikan dukungan berupa pendampingan psikologis serta psikososial lainnya seperti melapor polisi, mendapat akses pelayanan kesehatan juga pendampingan hukum ataupun advokasi. Beberapa tahun lalu Savy Amira mendampingi korban di pengadilan.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bu Nurul Fuad

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bu Siti Muzdafiah

Pendampingan perempuan korban kekerasan seksual sangat diperlukan karena pada umumnya mereka merasa menjadi satu-satunya orang yang mengalami tindakan tersebut. Hal ini berujung dengan menyalahkan diri sendiri atas hal yang menimpa dirinya. Lambat laun korban akan menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh kekerasan. Biasanya korban tidak mampu mengidentifikasi persoalan yang melatar belakangi kekerasan seksual yang ia terima. Selain itu lingkungan yang buruk akan mudah menyudutkan korban dengan melakukan *gaslighting* dan membuatnya semakin merasa bersalah. Maka dari itu pendampingan oleh organisasi perempuan sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual.

Setelah korban mendapatkan penanganan biasanya akan ada beberapa korban yang mengalami trauma hebat. Savy Amira hadir untuk membantu melewati proses pemulihan tersebut dengan salah satu programnya yaitu:

“Kebun pemulihan merupakan kerjasama dengan pemerintah Canada melalui program *Grand Challenge*. Program diadakan dengan mengajak Mantasa, WCC Jombang dan Fatayat NU. Program itu adalah berkebun sambil memulihkan diri dan psikologis bagi penyintas KDRT, tapi ada juga yang korban kekerasan seksual. Dipulihkan berarti mereka mendapatkan dampingan psikologis sampai trauma mereka dapat teratasi dan bisa dihadapi. Serta tidak lagi membawa muatan emosi yang berat bagi penyintas. Namun proses tidak setahun, dua tahun karena trauma kekerasan itu bertahun-tahun.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bu Siti Mazdafiah

Gambar 4. 1  
Kebun Pemulihan di Surabaya



(Sumber: Website Savy Amira)

Untuk kegiatan pencegahan yang mengandalkan keaktifan masyarakat sekitar dalam proses pelaporan dideskripsikan sebagai berikut:

“Dibentuknya kelompok-kelompok di masyarakat, kalau di Surabaya punya pos curhat di setiap kelurahan dan kecamatan. Savy Amira berusaha menguatkan pos curhat ini. Sehingga bagaimana caranya supaya ketika ada yang mendengar atau melihat tetangga maupun orang di lingkungan terdekatnya mengalami kekerasan berbasis gender, mereka mampu setidaknya merujuk ke lembaga-lembaga yang *concern* dengan isu tersebut. Atau bahkan mereka sendiri mampu memberikan dukungan dengan mengakses layanan kesehatan dengan ke rumah sakit, juga mengantarkan ke polisi untuk lapor.”<sup>49</sup>

Kekerasan seksual merupakan bentuk manifestasi budaya patriarki yang mengakar erat dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana bisa disebut sebagai budaya, karena selama ini masih jarang yang menggunakan perspektif korban dalam memandang kekerasan seksual. Orang-orang bahkan media mem-*framing* bahwa perempuan harus menjaga pakaian dengan memakai ini dan itu, dilarang melakukan hal-hal yang dapat memancing nafsu laki-laki, bahkan ketika sudah menjadi korban-pun masih

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bu Siti Muzdaifah melalui zoom

ada yang mempertanyakan apakah itu sepenuhnya salah pelaku atau karena terprovokasi korban.

Gerakan perempuan baru melakukan metode diskursif dengan menggunakan pendekatan budaya bergerak melawan patriarki. Gerakan ini disebut sebagai gerakan edukasi yang mana bertujuan memperkenalkan dan sedikit demi sedikit menggeser pola pikir yang *victim blaming* dan tidak menggunakan perspektif gender. Hal ini juga dilakukan oleh Savy Amira dengan menggelar berbagai diskusi dan *talkshow*. Pihak yang paling sering bekerjasama dengan Savy Amira adalah kampus UBAYA. Karena disitu ada sebuah kelompok Studi Gender dan Kesehatan, selain itu beberapa pegiat Savy Amira merupakan dosen dan lulusan UBAYA.

Gambar 4. 2  
Kegiatan Diskusi oleh Savy Amira



(Sumber: Akun media sosial Savy Amira)

Program edukasi yang diadakan oleh Savy Amira di kampus juga ada di tingkat sekolah dasar yaitu pendidikan seksualitas dan gender. Hal tersebut dalam rangka mengikuti *campaign* 16 Hari Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan. Diharapkan semakin dini usia dalam berkenalan dengan pemahaman gender maka semakin mudah mencegah kekerasan berbasis gender. Pendidikan masyarakat oleh Savy Amira selain kedua hal diatas bisa dijangkau melalui radio, website, sosial media, buku, buklet yang telah disediakan oleh Savy Amira bagi masyarakat umum.

Savy Amira juga melakukan advokasi kebijakan yaitu membuat atau mengusulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat pro-perempuan dan berkeadilan gender. Sebagai berikut:

“Kita turut mengadvokasi Undang-Undang Penghapusan KDRT dan baru-baru ini bersama Forum Pengada Layanan menginisiasi, memformulasi juga merumuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Lalu bersama program Mampu, Savy Amira menggalang dukungan masyarakat untuk pengesahan RUU PKS ini. Advokasi kebijakan tidak hanya melibatkan masyarakat umum namun juga tokoh agama dan anggota parlemen. Seperti protes penolakan RKUHP yang dilakukan di gedung DPR.”<sup>50</sup>

Gambar 4. 3  
Kegiatan Mendukung Pengesahan RUU PKS



(Sumber: Website Savy Amira)

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bu Siti Muzdafiah melalui zoom

Menanggapi kasus berbasis gender online seperti yang pernah dialami oleh beberapa orang, membuat Forum Pengada Layanan akan melakukan revisi terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jika sebelumnya ada 15 bentuk kekerasan seksual maka akan ditambahkan jenis kekerasan berbasis gender online. Mengutip dari SAFEnet, kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan kekerasan yang sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata hanya saja menggunakan media teknologi, selain itu tindakan yang dilakukan harus berdasarkan niat untuk melecehkan korban dengan pertimbangan gender atau seksual.

Aktivitas yang dikategorikan sebagai KBGO<sup>51</sup>:

- a. Pelanggaran privasi
  1. Berupa pengaksesan, penggunaan, manipulasi, dan penyebaran data diri, foto atau video tanpa sepengetahuan dan persetujuan.
  2. Doxxing atau menggali lalu menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.
- b. Pengawasan dan pemantauan
  1. Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline
  2. Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan
  3. Menggunakan GPS untuk melacak pergerakan target
  4. Menguntit
- c. Perusakan reputasi ataupun kredibilitas

---

<sup>51</sup> South East Asia Freedom of Expression Network, Sebuah Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Membuat dan berbagi data pribadi yang salah
  2. Memanipulasi atau membuat konten palsu
  3. Mencuri identitas dan impersonasi
  4. Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan atau yang lainnya dengan maksud mencoreng reputasi
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)
1. *Online* harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, data atau kontak yang tidak diinginkan
  2. Ancaman langsung kekerasan fisik atau seksual
  3. Komentar kasar
  4. Ujaran kebencian dengan target gender atau seksualitas tertentu
  5. Penghasutan terhadap kekerasan fisik
  6. Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
- e. Ancaman dan kekerasan langsung
1. Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi
  2. Pemerasan seksual
  3. Pencurian identitas, uang atau property
  4. Peniruan yang mengakibatkan serangan fisik
- f. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
1. Meretas situs web, media sosial atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat



2. Pengawasan dan pemantauan kegiatan
3. Ancaman kekerasan secara langsung
4. Pengepungan
5. Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan

LSM Savy Amira juga memiliki kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pihak yang berwajib rata-rata kurang memiliki pandangan yang berperspektif gender, hal ini menghambat proses penyelesaian kasus sebagai berikut:

“Dalam kekerasan seksual dan psikis, polisi menganggap tidak ada bukti. Karena tidak ada bekas luka, dan lukanya bersifat psikis. Dalam KUHP korban harus ke psikiater dan didiagnosa gangguan jiwa berat. Padahal dalam kasus seperti itu perempuan masih bisa berfungsi, berkegiatan sehari-hari. Namun dalam ukuran mereka itu tidak terbaca mengalami gangguan psikologis. Sehingga kemudian dianggap tidak ada kejahatan karena tidak ada dampak dan bukti fisik. Belum lagi jika mengadu setingkat polres hanya akan disuruh berdamai meskipun itu kasus kekerasan seksual dan KDRT”<sup>52</sup>

Maka dari itu, Savy Amira dalam Catatan Tahunannya pada 2019 mengangkat topik untuk mendesak penggunaan hasil pemeriksaan psikologis dalam Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) sebagai pembuktian kasus kekerasan seksual. Karena tidak semua korban kekerasan seksual mengalami gangguan jiwa berat. Jika korban menderita trauma psikis mendalam tetapi tidak sampai gangguan jiwa berat, apakah proses hukumnya harus dihentikan di tengah jalan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bu Siti Mazdafiah melalui zoom

## 2. KOPRI (Korp PMII Putri) Rayon FISIP UIN Sunan Ampel

Kampus di Indonesia khususnya UIN Sunan Ampel Surabaya terlihat jelas hierarki atau kelas sosial yang membatasi antara mahasiswa dan pengajar serta karyawan. Hal ini bukanlah sesuatu yang buruk namun harus hati-hati jika suatu ketika menvyikapi kasus kekerasan seksual. Semua pihak harus memahami secara penuh bahwa terdapat ketimpangn relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa. Dosen memiliki kekuatan untuk mengontrol mahasiswa secara tidak langsung. Hal ini dapat berupa pemberian nilai, pengaturan absensi, skorsing maupun tidak memberikan *acc* kepada mahasiswa. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus banyak yang tidak atau belum terungkap karena korban takut mendapatkan akibat dari usahanya bersuara. Upaya penanganan kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual dalam KOPRI dibagi menjadi dua bagian yaitu tindakan edukatif dan advokasi. Tindakan edukasi yang dilakukan adalah:

“Memperkenalkan ke anggota apa itu pelecehan seksual, bagaimana kategori pelecehan seksual, apa saja bentuknya. Banyak orang menganggap, menggoda orang yang lewat merupakan *jokes* iseng padahal itu termasuk pelecehan seksual. Tapi itupun masih susah menyadarkan, mereka diperkenalkan hal baru kalo yang biasanya mereka lakukan itu salah. Tapi karena mereka sering lakukan jadi sering lupa kalo sebenarnya itu pelecehan seksual. Upaya buat nyadarin masalah pelecehan seksual, paling dasar memperkenalkan hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka dari itu perlu tetap diberi edukasi orang-orang yang begitu”<sup>53</sup>

Tidak semua mahasiswa mengetahui bahwa ada batasan seseorang dalam memperlakukan perempuan. Sebagai contoh *catcalling*, penulis sendiri beberapa kali mengalami hal tersebut dalam lingkup kampus. Lebih

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sirriya melalui whatsapp

parahnya lagi banyak perempuan korban *catcalling* yang sudah merasa risih, takut malah dianggap berlebihan jika menegur pelaku. Hal ini semakin membuktikan urgensi pendidikan gender kepada mahasiswa.

Selain diskusi rutin anggota KOPRI, mereka juga mengadakan seminar di kampus. Namun, dikarenakan pandemi seminar yang diadakan melalui online atau webinar.

Gambar 4. 4  
Webinar KOPRI FISIP



(Sumber: Instagram KOPRI FISIP)

Setelah upaya edukasi yang dilakukan KOPRI juga memiliki agenda advokasi. Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya aksi gerakan yang berupa partisipasi dan koordinasi dalam melakukan advokasi kebijakan kampus yang sensitif gender. Seperti wawancara berikut ini:

“Jadi yang sempat kita bahas waktu itu, ada salah satu permasalahan oknum dosen yang tergolong kasus pelecehan seksual. Kebetulan ada korban yang berani cerita dan ternyata korbannya tidak hanya satu atau dua tapi banyak. Meskipun hasilnya kurang memuaskan tapi kurang lebih bisa

menyadarkan birokrat bahwa mahasiswa tidak diam ketika terdapat kasus pelecehan seksual.”<sup>54</sup>

Meskipun KOPRI merupakan wadah bagi kader perempuan PMII tapi mereka tetap membuka aduan dan penanganan kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual bagi seluruh mahasiswi FISIP seperti contoh kasus yang diungkap narasumber. Penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut mengapa dirasa kurang memuaskan karena sanksi yang diberikan hanya berupa pemindahan jam mata kuliah pelaku dengan dosen lainnya. Hal ini jelas saja tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun terduga pelaku lainnya yang masih belum terungkap. Sementara korban trauma secara psikis karena tindakan tersebut. Maka dari itu KOPRI melakukan pendampingan secara psikis dan moril kepada korban, juga tidak lupa advokasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak terkait.

Semua langkah yang ditempuh tergantung kepada keputusan korban, tindakan seperti apa yang hendak diambil. Karena tidak semua korban berani untuk menyuarkan tragedi yang menimpanya. Atau karena sudah pernah menyuarkan hal tersebut tapi diremehkan dan tidak dianggap serius. Sebagai contoh yang banyak sekali korbannya yaitu pelecehan seksual secara verbal dan daring yang dilakukan salah satu oknum di fakultas. Oknum tersebut sering menggoda mahasiswi yang bertemu dengannya, mengirimkan pesan ambigu yang menanyakan status hubungan mahasiswi, alamat kos, mengirimkan pesan di jam yang tidak lazim seperti

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Erin melalui whatsapp

tengah malam, bahkan dari hasil penuturan korban ada yang sampai memblokir nomor oknum tersebut namun ia tetap menemukan nomor barunya dan mengirim pesan lagi. Tindakan tidak etis tersebut secara tidak langsung dianggap biasa oleh individu-individu disekitar. Hampir semua orang di fakultas mengetahui tetapi memilih diam dan tidak melawan. Mungkin karena takut dipersulit urusannya atau tidak enak jika menegur karena mengenal oknum tersebut secara personal. Tidak ada dalih pembenaran atas kedua alasan tersebut.

Pergerakan organisasi perempuan di FISIP jalan secara lambat dan terkesan tidak ada progress yang berarti karena kurangnya atensi mahasiswa dalam memanfaatkan Himpunan, DEMA, dan SEMA. Hal ini sangat disayangkan mengingat organisasi intra seharusnya menjadi wadah aspirasi dan keluhan mahasiswa. Selain itu, memang karena organisasi intra sendiri tidak memiliki kesadaran untuk mengangkat isu-isu perempuan.

Gaung organisasi untuk mendorong upaya penanganan kekerasan seksual ini tidak dirasa karena dalam internal mereka juga masih perlu pembangunan yang lebih. Belum sampai ke tahap perbaikan. Kendala yang dihadapi KOPRI khususnya terkait edukasi sebagai berikut:

“Susahnya karena yang bikin kajian KOPRI jadi kader cowok enggan buat ikut. Mereka mengkategorikan KOPRI itu hanya urusan perempuan. Hal sekilas diskusi saja mereka memetakan mana yang buat perempuan dan laki-laki. Terus gimana masalah pembagian kerja. Padahal kajian pelecehan

seksual itu semua harus tahu entah laki-laki atau perempuan. Toh ya mereka sendiri gak bisa mengidentifikasi pelecehan seksual.”<sup>55</sup>

Kasus ini menggambarkan masih ada saja mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman perspektif gender rendah. Jika kasus sederhana pelecehan seksual saja mereka tidak memahaminya, rasanya agak sulit mewujudkan untuk mempunyai ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.

### 3. KOHATI (Korp HMI-Wati) Rayon FTK UIN Sunan Ampel

KOHATI sebagai gerakan perempuan di lingkungan kampus memiliki program kerja nasional yang menunjang upaya penghapusan kekerasan seksual antara lain:

- a. Menjalin dan membangun jaringan dengan organisasi mahasiswa dan organisasi perempuan dalam rangka pengembangan wawasan serta solidaritas kemanusiaan.
- b. Advokasi aktif terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap perempuan
- c. Melaksanakan program yang lebih aplikatif dan riil guna peningkatan kualitas bagi kader khususnya terkait dengan masalah kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan.
- d. Berupaya meningkatkan kreativitas kader dan masyarakat, agar kader dan masyarakat menjadi mandiri dalam bidang ekonomi.

---

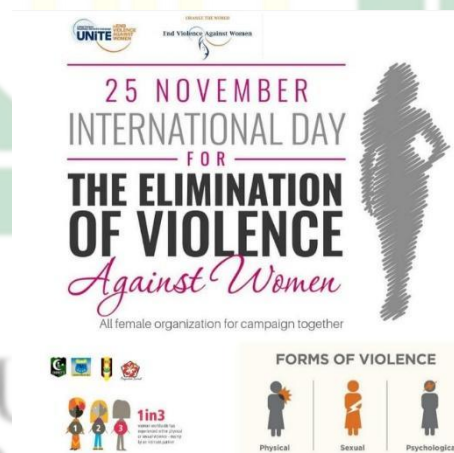
<sup>55</sup> Wawancara dengan Sirriya melalui whatsapp

- e. Melindungi hak perempuan dan anak di Indonesia.

Berdasarkan program nasional, Kohati Rayon lebih menekankan aspek preventif atau edukasi terkait kekerasan seksual dengan mengadakan forum diskusi dan kajian-kajian, antara lain:

- a. Kajian online dengan tema “Peran Ganda dalam Diri Perempuan: Tuntutan Peran Ganda Ibu dan Guru Selama Pandemi Covid-19
- b. Mengikuti *campaign* yang bertema penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Gambar 4. 5  
Kampanye Oleh UNITE



(Sumber: Instagram KOHATI FTK)

- c. Kajian kesehatan reproduksi yang digelar pada bulan Februari 2020.

Gambar 4. 6  
Kegiatan Kajian Rutin



(Sumber: Instagram KOHATI FTK)

- d. Rutin mengikuti aksi Women's March tiap tahun
- e. Kajian online tentang RUU Ketahanan Keluarga: Pelanggaran Budaya Patriarki Hingga Mengatur Hubungan Suami Istri

Terkait strategi advokasi kasus kekerasan seksual di dalam kampus yang dilakukan oleh KOHATI belum dapat terwujud, apalagi setelah pandemi melanda yang mengharuskan mahasiswa berkuliah dari rumah. Berikut merupakan hasil wawancara:

“Kalo kepengurusanku belum pernah ada pendampingan. Aku sudah coba komunikasi dengan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) untuk mengajak kerjasama. Tetapi pihak KPI masih sibuk dengan jadwal kegiatan diluar kota. Lalu akhirnya ada pandemi yang mengharuskan kita untuk kembali ke rumah masing-masing”<sup>56</sup>

Selain itu, waktu pertemuan antara KOHATI dengan korban belum menemukan titik temu dengan alasan padatnya waktu masing-masing. Perjuangan mencari lembaga yang *concern* dengan isu kekerasan seksual

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Mafida melalui Whatsapp



terhadap perempuan tidak berhenti. Pengurus Kohati lalu mendatangi KPPAI namun kantornya selalu sepi. Akhirnya Kohati memiliki agenda membentuk komunitas baru yang berfokus pada isu perempuan di UIN Sunan Ampel. Hingga wawancara selesai, ia menuturkan bahwa hal tersebut masih berupa rancangan.

Sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena tidak terwujudnya upaya advokasi korban karena hal sepele. Ketika KOHATI menemui jalan buntu dalam meminta bantuan organisasi luar kampus seharusnya mereka mencari jalan lain penyelesaian entah berupa kerja sama dengan organisasi intra kampus atau mengawal sendiri kasus tersebut. Jangan sampai masalah perpolitikan antar organisasi menjadi penghalang penegakan kasus kekerasan seksual, hal ini sangat tidak etis jika terbukti benar. Selain itu, niat baik gerakan perempuan seperti ini jika mangkrak seharusnya dibicarakan dalam forum lalu dikerjakan secara gotong royong dengan segenap internal organisasi agar mampu mencari solusi akan permasalahan tersebut.

Tidak berbeda dengan kendala yang dialami oleh KOPRI, edukasi tentang upaya melawan kekerasan seksual yang dilaksanakan KOHATI maupun kajian gender yang lainnya lebih banyak dihadiri oleh kader perempuan. Meskipun memang KOHATI dikhususkan perempuan tetapi kajian yang seperti ini bersifat universal dan sudah seharusnya perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman yang sama.

#### 4. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Tujuan utama PKK adalah menyejahterakan keluarga. Maka dibuatlah sepuluh program pokok PKK. Kesepuluh program tersebut sebagai berikut:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- b. Gotong royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- f. Pendidikan dan keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan koperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat.

Senada dengan tujuan pembentukan PKK yang ingin menjadikan keluarga sejahtera, maka kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak jauh dari peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut bisa diartikan sebagai aksi pemberdayaan perempuan melalui penguatan ekonomi. Dalam gerakan PKK Gresik PPI para anggota terbantu dengan adanya usaha kolektif, yaitu kumpulan usaha kecil menengah yang menjual berbagai produk hasil karya sendiri. Kumpulan UKM ini sering diikuti bazaar maupun lomba yang diadakan Pemkot dan Kecamatan. Detail produk milik PKK Gresik PPI sebagai berikut:

“Contohnya PKK gang 7 gawe teh pecut kuda. Mereka yo bikin manisan cerme, bahan-bahannya yawes tinggal metik sendiri. Pas ada

festival rujak uleg produk lain muncul. Ada putu, klepon, pisang kipas, jamu. Gak nyangka hasil tanggapan sana sini banyak juga. Tapi akhire beberapa ada yang lanjut ada yang mutul.”<sup>57</sup>

Peneliti mengidentifikasi kegiatan tersebut sebagai upaya preventif atau pencegahan kekerasan seksual dalam skala keluarga. Perempuan yang berdaya dalam hubungan sosial dan ekonomi secara tidak langsung akan membentuk sebuah *framing* pemikiran bahwa dirinya memiliki peran dalam rumah tangganya. Jadi ketika menghadapi skenario buruk yang tidak ada satu orangpun mau terlibat di dalamnya mereka setidaknya akan memiliki kesadaran bahwa mereka mampu berjuang untuk dirinya sendiri.

Gerakan perempuan PKK Gresik PPI juga pernah membantu mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah mereka. Saat itu kegiatan kumpul-kumpul yang rutin mereka lakukan terdapat suatu aduan kekerasan seksual yang dialami salah satu anak. Keluarga korban meminta tolong anaknya mendapat pendampingan secara psikis kepada salah satu kader. Hal tersebut langsung ditindak dengan menggandeng staf RW. Keluarga korban tidak berkenan untuk membawa perkara tersebut ke jalur hukum karena mempertimbangkan efek trauma yang diderita sang anak. Saat itu sebenarnya mereka sudah menyiapkan pengacara dan membawa kamtib untuk menyelesaikan kasusnya, namun suara korban patut didengarkan dan dihargai. Kasus kekerasan seksual tersebut diakhiri dengan jalur mediasi dengan sanksi pelaku tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan ekonomi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bu Nurul Fuad

lagi sebagai mata pencahariannya atau ia harus pindah dari lingkungan setempat.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah domestik yang tidak maupun belum terungkap biasanya karena muncul anggapan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga yang harus ditutupi. Jika hal ini dibiarkan maka korban mendapatkan kekerasan secara berlapis dengan pembungkaman kejadian yang menyimpannya. Maka dari itu perlu adanya kesadaran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dan pelaku adalah pihak yang salah jangan sampai definisi tersebut ditukar. Selain itu, pihak pendamping korban juga harus pandai dalam menyikapi aduan yang diterima dengan tidak mengungkap identitas korban dan menjaga kerahasiaannya.

### **C. Analisis Teori**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan mengenai gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya bisa dikatakan bahwa varian gerakan ada bermacam-macam. Aspek corak gerakan dan tujuan merupakan pembeda antara gerakan perempuan yang satu dengan yang lain. Gerakan pendampingan korban tercermin dalam LSM Savy Amira dengan tujuan menciptakan ruang aman bebas dari kekerasan. Lalu ada gerakan pemberdayaan yang terciptakan melalui gerakan perempuan KOPRI, KOHATI dan PKK Gresik PPI dengan tujuan secara general sebagai wadah aspirasi tiap anggota untuk

berkembang. Kedua tipe gerakan tersebut saling melengkapi dan memiliki medan atau arena tersendiri dalam praktiknya.

Jika meninjau hasil wawancara peneliti, upaya yang dilakukan oleh masing-masing gerakan perempuan terbagi menjadi tindakan preventif, advokasi dan penanganan. Tindakan preventif dilakukan dengan mengedukasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terkait kekerasan seksual. Advokasi membantu merumuskan kebijakan yang dapat digunakan untuk mencegah juga menangani kasus kekerasan seksual. Sedangkan tindakan penanganan merupakan pendampingan psikologis dan hukum, serta pemulihan korban dari aspek psikologis dan ekonomi. Selain itu menurut peneliti, gerakan perempuan serupa PKK yang pada rezim orde baru dijadikan alat domestifikasi perempuan mengalami sedikit transformasi. Pada saat ini PKK justru menjadi ajang bagi perempuan untuk berkarya dan menyampaikan aspirasinya terkait isu-isu yang ada di lingkungannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh PKK termasuk dalam tindakan preventif, namun memiliki aspek yang sedikit berbeda. Jika tindakan preventif pada umumnya seputar pemahaman konsep isu keperempuanan, maka ini menekankan aksi pemberdayaan perempuan.

Penjelasan yang telah dideskripsikan oleh peneliti dianalisa melalui kacamata gerakan sosial baru, dimana teori tersebut cukup relevan untuk menjelaskan strategi gerakan perempuan melalui tiga aspek:

Pertama, aspek representasi sosial yang berdasarkan identitas kolektif. Gerakan perempuan yang termanifestasi untuk menyuarkan ketertindasan

dari kekerasan seksual di Surabaya yaitu LSM Savy Amira, KOPRI, KOHATI, dan PKK. Gerakan ini lahir dari kesadaran perempuan bahwa hak dasar manusia untuk hidup dalam rasa aman tanpa kekerasan seksual tengah terancam. Organisasi perempuan dalam penelitian ini merupakan kelompok yang berjuang melawan diskriminasi seksual yang berakar dari budaya. Jika hambatan berasal dari aspek kultural maka perjuangan balasan lebih efektif dari segi budaya juga. Upaya penghapusan kekerasan seksual didasari atas peran sentral perempuan dalam membentuk sebuah kebudayaan baru yang berperspektif gender. Contohnya, untuk menjadikan suatu nilai agar berkembang menjadi kebudayaan maka diperlukan tindakan sosial yang bersifat kolektif. Pengadaan forum diskusi di tiap lapisan harus terus berjalan, bisa dimulai dari pengenalan kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Setelah itu mempelajari langkah penanganan atau pendampingan dan seterusnya. Ketika pemahaman itu mulai terbentuk maka timbul keterlibatan aktif dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Peran sentral perempuan memegang andil besar dalam strategi penghapusan kekerasan seksual di Surabaya.

Kedua, aspek penafsiran konflik. Sejatinnya, ruang sosial bagi gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual tengah mengalami penciutan dan digerogoti kemampuan kontrol negara. Dari segi penanganan kasus kekerasan seksual oleh pihak yang berwajib kurang ditanggapi dengan serius. Polisi dalam hal ini mengharuskan alat bukti yang kurang relevan. Pemeriksaan psikiatri yang tidak menunjukkan gejala stress berat tidak

dianggap sebagai bukti. Pada beberapa kasus yang diajukan dengan melibatkan perempuan yang sudah menikah akan diselesaikan secara kekeluargaan. Prinsip yang mereka gunakan adalah agar jangan ada perceraian, tidak peduli dalam hubungan tersebut penuh kekerasan.

Tidak jauh berbeda dengan kepolisian penanganan kasus kekerasan seksual dalam institusi pendidikan. Memang contoh yang digunakan oleh informan dalam penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual. Tetapi hal ini tetap menimbulkan kekecewaan dimana tindakan penanganan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Diperlukan sebuah instrumen penanganan kekerasan seksual dalam kampus sebagai acuan dalam memberikan *treatment* bagi pelaku dan korban.

Dari segi advokasi kebijakan masih jalan di tempat. Usulan RUU yang telah diajukan oleh berbagai lembaga perempuan selama bertahun-tahun tidak masuk dalam program legislasi nasional. Berbagai dukungan dari lapisan masyarakat serasa tidak didengarkan oleh wakil rakyat itu sendiri. Belum lagi keterwakilan perempuan dalam puncak pimpinan pembuat kebijakan seakan tidak memberikan efek apa-apa bagi arah perjuangan perempuan di Indonesia.

Ketiga, aspek kesadaran individual. Gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual tercipta dari tindakan individu dalam membuat keputusan tentang upaya penciptaan ruang aman bagi perempuan dimanapun baik di ruang publik maupun domestik. Mereka telah memahami perubahan yang dapat terjadi terhadap sistem sosial ketika mereka merespon

keresahan akibat dari kekerasan seksual. Untuk itulah mereka bergabung dengan gerakan-gerakan perempuan tersebut.

Selama masih ada individu-individu yang melanggengkan praktik patriarki, selama itulah gerakan perempuan terus tumbuh dan berkembang untuk melawan segala praktek diskriminasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil temuan peneliti dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti bisa menyimpulkan beberapa hal terkait rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Varian gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tipe yaitu gerakan yang berfokus pada penanganan korban dan gerakan yang berfokus pada pengembangan diri perempuan. LSM Savy Amira termasuk dalam kategori gerakan pendampingan korban. KOHATI, KOPRI dan PKK termasuk dalam kategori gerakan pengembangan diri perempuan. Secara efektifitas dalam upaya melawan kekerasan seksual maka LSM Savy Amira akan berada jauh lebih maju daripada ketiga gerakan perempuan lainnya, hal ini karena tujuan didirikannya saja sudah berbeda, belum lagi aktor di dalamnya yang memiliki latar belakang yang berbeda pula.

Upaya gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya menggunakan teori gerakan sosial baru. Pertama, perempuan adalah aktor utama dalam membangkitkan semangat juang penghapusan kekerasan seksual di Surabaya. Perempuan-perempuan ini menyusun strategi yang berupa tindakan preventif dan penanganan. Tindakan preventif yang dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar, dan *campaign* akan isu-isu keperempuanan. Tindakan penanganan yang dilakukan yaitu

pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, juga pemulihan psikis pasca trauma. Selain itu ada advokasi kebijakan dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual di ranah hukum.

Kedua, penafsiran konflik. Gerakan perempuan dalam penelitian ini menunjukkan abainya aparat maupun birokrat menangani kasus kekerasan seksual. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman gender dan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Ketiga, kesadaran diri. Anggota yang memutuskan bergabung dengan gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual telah memiliki kekhawatiran akan isu tersebut dan berusaha mengubah sistem sosial yang merugikan perempuan.

## **B. Saran**

Dari data yang diperoleh peneliti mengenai gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual di Surabaya maka saran yang bisa disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat yang melihat dan mengetahui tindak kekerasan seksual di sekitarnya seharusnya tidak mendiamkannya. Minimal bisa melaporkan kasus tersebut ke lembaga perlindungan perempuan atau pihak yang berwenang.
2. Bagi mahasiswa yang masih kurang memahami permasalahan kekerasan perempuan perlu untuk setidaknya memiliki kepekaan gender. Lebih-lebih mau mempelajari isu keperempuanan

3. Bagi dewan perwakilan rakyat perlu memberikan ruang lebih bagi advokasi kebijakan yang dilakukan perempuan. Agar payung hukum yang mampu melindungi korban dan meregulasi sanksi bagi pelaku dapat diatur dengan lebih baik.
4. Untuk peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai gerakan perempuan dalam melawan kekerasan seksual dapat mencari rujukan atau penyempurna dengan menambahi pandangan korban atau individu yang telah dibantu untuk dipulihkan. Selain itu juga perlu pandangan pemerintah terkait macetnya regulasi perlindungan perempuan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Alain Touraine. 1985. An Introduction to The Study of Social Movements. Social Research Vol. 52
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta,
- Blackburn. 2004. Women and The State in Modern Indonesia. United Kingdom: Cambridge University Press
- Dadang Supardan. 2008. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Deddy Mulyana. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
- Della Porta & Mario Diani. 2006. Social Movements: An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition. Malden, MA: Blackwell
- Fraser. 1992. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Cambridge, MA: MIT Press
- Ima Wati, dkk. Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung.
- Jusuf Soewadji. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Perempuan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Pippa Norris. 1995. Political Recruitment: Gender, Race and Class in The British Parliamen. Cambridge University Press
- Rajendra Singh. 2010. Gerakan Sosial Baru (GSB). Yogyakarta: Resist Book
- Ross. 2009. Culture in Comparative Political Analysis in M. I Lichbach & A Zuckerman Rationality, Culture and Structure. New York: Cambride University Press
- Sakina. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Social Work Journal

Saskia Wieringa. 2010. Pasang Surut Gerakan Perempuan Indonesia (Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan Kalyanamitra) in Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara (Komnas Perempuan)

South East Asia Freedom of Expression Network. Sebuah Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online

Sri Kumalaningsih. 2012. METODE PENELITIAN: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan. Malang:UB Press

Tim Penggerak PKK Pusat. Hasil Rapat Kerja Tahunan VII PKK Tahun 2010. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat

United Nations Population Fund HQ. 2020. COVID-19: A Gender Lens: PROTECTING SEXUAL AND REPRODUCTIVE



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A